Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta

2026

LKJIP





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025






TOP BUMD
AWARDS 2025
PERUMDA BPR PURWAKARTA
TOP BUMD AWARDS 2025 BPR # Bintang 4
TOP CEO BUMD 2025
DEDEH KURNIASIH - DIREKTUR UTAMA
TOP PEMBINA BUMD 2025
SAEPUL BAHRI BINZEIN, S.AG - BUPATI PURWAKARTA
BINTANG 4






SIDANG TERPADU ISBAT NIKAH
TAHUN 2025










Selamat Hari
BELA NEGARA


2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 yang disusun pada tahun 2026 ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menggambarkan capaian kinerja Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Dalam hal ini LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini diharapkan Perangkat Daerah senantiasa melakukan perbaikan dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis Kabupaten Purwakarta, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Visi kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 adalah “Purwakarta Istimewa”. Dalam upaya perwujudan visi tersebut maka ditetapkan 4 (lima) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 12 (Dua Belas) Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang direalisasikan melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-

2029, bahwa telah ditetapkan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 11 sasaran, dengan 79 indikator sasaran. Dari 79 indikator sasaran yang diukur, rata – rata realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2025 sebesar 106,80% (merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI). Adapun rincian capaian dari setiap misi adalah sebagai berikut : sebanyak 40 indikator sasaran (50,63%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 32 indikator sasaran (45,83%) tidak mencapai target dan sebanyak 6 indikator kinerja (7,59%) belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena data belum rilis.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut, dimana Capaian Misi 1 memberikan kontribusi sebesar 96,36%, Misi 2 memberikan kontribusi yaitu sebesar 84,16%, Misi 3 memberikan kontribusi yaitu sebesar 122,22%. Misi 4 memberikan kontribusi yaitu sebesar 97,94%.

1. **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Unggul, Profesional dan Produktif serta Memiliki Karakter dan Akhlak yang Baik.**

   Jumlah sasaran kinerja pada Misi I sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang diukur sebanyak 26 indikator. Sebanyak 18 indikator (69,23%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 7 indikator (26,92%) tidak mencapai target dan sebanyak 1 indikator (3,85%) tidak ada capaian karena data belum rilis.

2. **Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkarakter dan Merata di Seluruh Wilayah, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Hidup dan Kebencanaan, serta Memperkuat Ketahanan Energi, Air dan Pangan yang Berkelanjutan.**

   Pada Misi II, jumlah sasaran kinerja sebanyak 3 sasaran. Jumlah indikator kinerja sasaran yang diukur sebanyak 17 indikator. Sebanyak 3 indikator (17,65%) mencapai bahkan melebihi target, 12 indikator

(70,59%) tidak mencapai target dan sebanyak 2 indikator (11,76%) tidak ada capaian karena data belum rilis.

3. **Misi 3 : Menciptakan Iklim Investasi dan Stabilitas Keamanan dan Ekonomi yang Kondusif, Memperluas Akses Kesempatan Kerja, serta Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing.**

   Jumlah sasaran kinerja pada Misi III sebanyak 2 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang diukur sebanyak 19 indikator. Sebanyak 12 indikator (63,15%) mencapai bahkan melebihi target, 6 indikator (31,58%) tidak mencapai target dan sebanyak 1 indikator (5,26%) tidak ada capaian karena data belum rilis.

4. **Misi 4 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Inovatif, Efektif, Efisien dan Berbasis Digital.**

   Pada Misi IV, jumlah sasaran kinerja sebanyak 1 sasaran. Jumlah indikator kinerja sasaran yang diukur sebanyak 17 indikator. Sebanyak 7 indikator (41,18%) mencapai atau melebihi target, 8 indikator sasaran (47,06%) tidak mencapai target dan 1 indikator (5,88%) tidak ada capaian karena data belum rilis.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.786.085.169.101 atau 87,14% dari total anggaran yaitu sebesar Rp2.427.693.258.869,-

BUPATI PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Sampurasun,

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Alhamdulillah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025, sesuai waktu yang telah ditetapkan. LKjIP Tahun Anggaran 2025 merupakan LAKIP tahun kesatu perencanaan dalam RPJMD 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Purwakarta ini disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan Visi dan Misi Kabupaten selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kewajiban Penyusunan LKjIP bagi setiap instansi pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi LKjIP menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapain target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RPJPD. LKjIP merupakan potret nilai prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga merupakan informasi penting yang wajib disampaikan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, serta khususnya bagi segenap aparatur penyelenggara pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksana pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon masukan pada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan secara menyeluruh.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan bersama dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta yakni "Purwakarta Istimewa". Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 27 Maret 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ---------- **i**

KATA PENGANTAR ---------- **iv**

DAFTAR ISI ---------- **vi**

DAFTAR GAMBAR/TABEL ---------- **viii**

BAB I : PENDAHULUAN ---------- **1**

1.1 Latar Belakang---------- 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja---------- 4

1.3 Aspek Strategis serta isu Strategis Daerah Kabupaten Purwakarta---------- 8

1.3.1 Aspek Strategis Daerah Kabupaten Purwakarta ---------- 8

1.3.2 Isu Strategis Organisasi---------- 19

1.4 Dasar hukum penyusunan LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 ---------- 25

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-------- 27

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ---------- **30**

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta-- 30

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 (Visi Misi RPJMD) ---------- 30

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Indikator ---------- 32

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan ---------- 39

2.1.4 Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ---------- 41

2.1.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah---------- 44

2.1.6 Program---------- 45

2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025---------- 61

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ---------- 77

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ---------- 79

3.2 Realisasi Anggaran ---------- 257

BAB IV : PENUTUP ---------- 263

DAFTAR GAMBAR / TABEL

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta	10
Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	11
Tabel 1.2	Penyebaran Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut Umur Tahun 2025	12
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Tahun 2025 Semester I Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	13
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2025	14
Tabel 1.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2025	16
Tabel 1.6	Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2025	18
Tabel 1.7	Garis Kemiskininan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2025	19
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Indikator Kabupaten Purwakarta	32
Tabel 2.2	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta	44
Tabel 2.3	Program Pembangunan	46
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	62
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Perubahan	69
Tabel 3.1	Skala Nilai Capaian Kinerja	79
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	133
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025	143
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025	156
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Purwakarta dengan Capaian Provinsi Tahun 2025	162

Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Kinerja Tahun 2025 ----------	171
Tabel 3.7	Program yang menunjang capaian kinerja Tahun 2025 ----------	192
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025--	257
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Tahun 2025----------	260

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* haruslah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan) sehingga pengelolaan pemerintah dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Tata pemerintahan yang baik *(good governance)* memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian keuangan tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, baik berupa output maupun outcome.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance* yang terdiri dari partisipasi masyarakat (*participation*), tegaknya supremasi hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), peduli pada *stakeholder*/dunia usaha, berorientasi pada konsensus (*consensus*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategis (*strategic vision*).

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus

dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai".

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) tahun 2025 ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja tahun sebelumnya, LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Hal tersebut di atas sejalan dengan tegaknya otonomi daerah,

dimana dalam proses pelaksanaannya menimbulkan banyak perubahan yang bersifat dinamis terutama terkait dengan keharusan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and clean government*). *Good Governance* dapat berjalan dengan baik, dengan adanya komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Upaya penyelenggaraan *Good Governance* didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Selain itu, penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2025-2029 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati Purwakarta sebagai Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman; dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
    5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,

Urusan Pemerintahan bidang perindustrian. dan Urusan Pemerintahan dan Perdagangan;

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
19. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian;
20. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan Pendapatan Daerah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. Selain UPTD pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan Pendidikan baik formal maupun non formal.

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah, dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

1.3 Aspek Strategis serta isu Strategis Daerah Kabupaten Purwakarta

1.3.1 Aspek Strategis Daerah Kabupaten Purwakarta

1.3.1.1. Aspek Geografis Daerah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purwakarta, yaitu dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor; dan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 ha (971,72 km^2) atau 2,81 persen dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 505 dusun, 1.125 Rukun Warga (RW), dan 3.498 Rukun Tetangga (RT). Jarak antar kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km yaitu antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered, sedangkan jarak terjauh adalah 60 km yaitu antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari.

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan

Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 m di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 mdpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 mdpl. Wilayah Bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 mdpl.

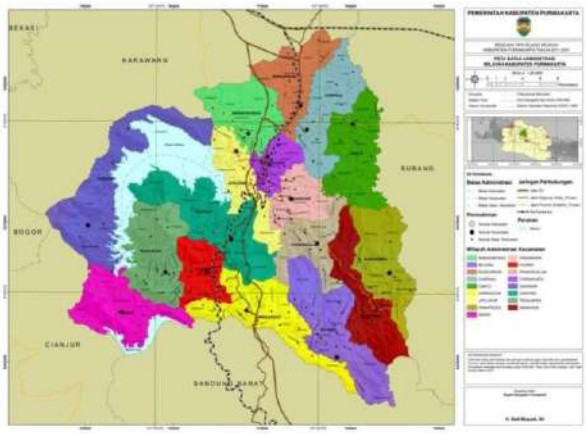
Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:

a. Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100-2.036 mdpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
b. Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500-1.100 mdpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.
c. Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35-499 mdpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Peta Admistrasi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

GAMBAR 1.1

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber: Badan Pusat Statistik

Luas Wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

TABEL 1.1

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/ KELURAHAN
	Km²	%	
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	56,50	5,81	10
17. Bungursari	54,66	5,63	10
JUMLAH	**971,72**	**100,00**	**192**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu seluas

95,43 km^2 atau 9,82%, sedangkan Kecamatan Purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 24,83 km^2 atau 2,56%. Untuk jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16 desa, sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 5 desa.

1.3.1.2. Aspek Demografi Daerah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester I, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebanyak 1.073.459 jiwa terdiri dari 544.306 laki-laki (50,71%) dan 529.153 perempuan (49,29%).

Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menurut kelompok umur tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

TABEL 1.2
PENYEBARAN PENDUDUK KABUPATEN PURWAKARTA
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2025

NO.	KELOMPOK UMUR (Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	0 – 14 (Usia Muda)	135.643	126.742	262.385	24,44
2.	15 – 64 (Usia Produktif)	373.292	365.130	738.422	68,79
3.	65+ (Usia Tua)	35.371	37.281	72.652	6,77
JUMLAH		**544.306**	**529.153**	**1.073.495**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, 2025

Dari Tabel 1.2 di atas dapat terlihat bahwa penduduk

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yang terbanyak antara usia 15-64 tahun yaitu sebesar 68,79% (738.422 jiwa), hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Purwakarta berada dalam struktur penduduk usia produktif.

Sedangkan berdasarkan gender, penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 hampir seimbang, yaitu laki-laki sebanyak 544.306 jiwa (50,71%) dan perempuan sebanyak 529.153 jiwa (49,29%).

Bila dilihat per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta, yaitu sebanyak 188.575 jiwa dari 1.073.459 atau sebesar 17,56%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025 SEMESTER I
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH JIWA
	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1. Purwakarta	62.075	94.641	93.934	**188.575**
2. Campaka	18.957	27.917	27.513	**55.430**
3. Jatiluhur	26.142	39.866	38.875	**78.741**
4. Plered	29.439	45.682	44.285	**89.967**
5. Sukatani	28.251	43.281	41.688	**84.969**
6. Darangdan	26.069	39.027	37.542	**76.569**
7. Maniis	13.079	20.566	19.495	**40.061**
8. Tegalwaru	19.601	29.655	28.375	**58.030**
9. Wanayasa	15.649	23.697	22.394	**46.091**
10. Pasawahan	18.088	26.506	25.667	**52.173**
11. Bojong	18.694	29.487	27.632	**57.119**
12. Babakancikao	21.598	32.025	32.135	**64.160**
13. Bungursari	21.963	32.692	32.575	**65.267**

14. Cibatu	12.340	17.134	16.934	**34.068**
15. Sukasari	6.158	9.736	9.197	**18.933**
16. Pondoksalam	11.828	16.902	16.218	**33.120**
17. Kiarapedes	10.816	15.492	14.694	**30.186**
JUMLAH	**360.747**	**544.306**	**529.153**	**1.073.459**
PERSENTASE		**50,71**	**49,29**	**100**

(*Data Agregat Penduduk, Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2025)*

1.3.1.3. Aspek Ekonomi Daerah

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi *(economic growth)* adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Perekonomian nasional yang terus menunjukkan pertumbuhannya baik dari segi investasi maupun sektor perdagangan memberikan imbas pada nilai investasi di Kabupaten Purwakarta yang semakin meningkat, begitupun pada sektor perdagangan memperlihatkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.

Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2021-2025, dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini.

TABEL 1.4

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2021-2025

NO.	TAHUN	JUMLAH (%)
[1]	[2]	[3]
1.	2021	3,42
2.	2022	5,24
3.	2023	4,97
4.	2024	4,64
5.	2025	5,26

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta (Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2026)

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Purwakarta Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mencapai sebesar 5,26 % mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai sebesar 4,64% yaitu sebesar 0,62%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Purwakarta dari tahun 2023-2025, dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan per-kapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 6,59 triliun rupiah.

TABEL 1.5

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2023-2025

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah))	82.129.260,00	88.254.550,00	94.835.090,00
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	51.740.500,00	54.142.290,00	56.989.150,00

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta (Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2026)

PDRB Kabupaten Purwakarta selain menunjukan pertumbuhan ekonomi, juga dapat menggambarkan struktur ekonomi. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total, dimana pada tahun 2025 peranan atau kontribusi terbesar didukung oleh kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 56,32% dan Kategori Perdagangan Besar

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan katagori yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB yaitu sebesar 10,87%.

c. Laju Inflasi

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan *(demand)* dengan penyediaan *(supply)*.

Laju inflasi Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini.

TABEL 1.6

LAJU INFLASI KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2021-2025

NO.	TAHUN	(%)
[1]	[2]	[3]
1.	2021	1,81
2.	2022	4,86
3.	2023	3,22
4.	2024	0,93
5.	2025	2,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2026)

Dalam skala makro/ nasional, penyebab meningkatnya angka inflasi lebih karena terjadinya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,74 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah sebesar 1,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,95 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,19 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,79 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,91 persen. Data tersebut di atas dari hasil pendataan harga yang meliputi sepuluh kota pantauan IHK Gabungan di Jawa Barat 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.

d. Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2025 sebanyak 76.500 orang. Bila dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun 2025, persentase kemiskinan di Kabupaten Purwakarta terjadi penurunan sebesar 8,41%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1.7
GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PRESENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2025

KOMPONEN KEMISKINAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	467.948	483.968
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	81,44	76,50
Persentase Penduduk Miskin	8,41%	7,87%

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta (Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2026)

1.3.2 Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, hasil kajian lingkungan hidup strategis, dan isu strategis RPJPD Kab. Purwakarta

Tahun 2025-2045, maka penetapan Isu Strategis Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia.

   Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta. Di era persaingan global dan transformasi digital, SDM yang unggul, profesional, dan produktif menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi meliputi kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, rendahnya akses terhadap pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, serta belum optimalnya pengembangan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi. Selain itu, perubahan struktur ekonomi menuntut adanya adaptasi SDM terhadap perkembangan sektor-sektor baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi digital.

2. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah.

   Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah menjadi isu strategis yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai

   penunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi faktor utama dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Saat ini, tantangan yang dihadapi mencakup kesenjangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi,

terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Konektivitas antar wilayah yang belum optimal menghambat arus barang dan jasa, membatasi mobilitas masyarakat, dan memperlambat akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana.

   Pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana merupakan isu strategis yang krusial dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Dengan karakter geografis yang beragam, termasuk kawasan pegunungan, perairan, dan daerah urban, Kabupaten Purwakarta menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, pencemaran air, penurunan kualitas udara, serta risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Urbanisasi yang pesat dan aktivitas industri yang meningkat turut memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan, sementara perubahan iklim global memperbesar potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan yang terpadu dan peningkatan kapasitas mitigasi serta adaptasi terhadap bencana untuk melindungi ekosistem dan keselamatan masyarakat.

4. Stabilitasi Ketahanan Pangan.

   Stabilisasi ketahanan pangan merupakan isu strategis yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Sebagai daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian, ketahanan pangan menjadi pilar utama dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh lapisan

masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan hasil produksi, hingga fluktuasi harga pangan yang berdampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pertanian, ketersediaan air irigasi, dan akses terhadap teknologi pertanian modern menjadi faktor yang memengaruhi produktivitas pangan di tingkat lokal.

5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal.

   Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal menjadi isu strategis yang krusial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di Kabupaten Purwakarta. Sebagai wilayah yang memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi potensi lokal menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari ketergantungan pada sektor industri besar, kesenjangan akses pasar bagi pelaku UMKM, hingga kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi global dan nasional, fluktuasi harga bahan baku, serta perkembangan teknologi digital menuntut adanya adaptasi kebijakan ekonomi yang inovatif dan responsif.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

   Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi menjadi isu strategis yang krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif di

Kabupaten Purwakarta. Di era digital, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan efisien semakin meningkat, sehingga pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Tantangan yang dihadapi mencakup kompleksitas proses birokrasi, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi, serta membangun sistem yang terintegrasi dan aman untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan tahun 2025 ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2029. Program dan kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap bidang atau sektor pembangunan, diharapkan mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek tata ruang dan infrastruktur Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 pada Tahap I Periode Pembangunan Tahun 2025 - 2029 yaitu **"Penguatan Fondasi Sosial Ekonomi, SDM dan Infrastruktur Dasar"** yang merupakan tahap awal dalam mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka panjang, dimana pada tahap ini arah kebijakan pembangunanya

difokuskan pada pembangunan fondasi sosial ekonomi, sumber daya manusia dan infrasrtuktur dasar agar dalam mewujudkan kabupaten purwakarta yang “maju” harus dibangun fondasi yang kuat dari aspek strategis tersebut. Penguatan fondasi sosial ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur dasar menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Adapun Tahapan dan Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029 antara lain :

a. Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Profesional.
b. Memantapkan kemandirian perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia yang berdaya saing.
c. Optimalisasi potensi unggulan daerah dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian lokal berdaya saing dan ketahanan pangan berkelanjutan.
e. Mewujudkan Purwakarta istimewa
f. Memantapkan stabilitas ekonomi sosial dan ekologi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan.

Tema pembangunan pada tahun 2030 disusun guna mempersiapkan pelaksanaan RKPD 2030 yang akan mempedomani RPJMD 2025-2029 sebagai bagian dari transisi penyusunan RPJMD 2030-2034. Sehingga kebijakan perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dapat disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2030-2034. Hal ini untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan dan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.

1.4 Dasar hukum penyusunan LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025

Penyusunan LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, Dasar Hukum dan Sistematika.

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

3. Aspek Strategis dan Isu Strategis
4. Landasan Hukum
5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

   a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
   d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
   e. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
   f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
   g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 adalah penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pemerintahan daerah tahun 2025, yang merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada beberapa tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah, dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Visi Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 (Visi Misi RPJMD).

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mengacu kepada Visi

dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI :

“PURWAKARTA ISTIMEWA”

MISI :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.

Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.

Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.

Keempat misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 tersebut menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sehingga diharapkan visi "Purwakarta Istimewa" dapat terwujud, menjadikan Purwakarta sebagai daerah yang maju secara ekonomi, tangguh menghadapi tantangan, dan

memberikan kehidupan yang berkualitas bagi seluruh warganya.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Indikator

Sejalan dengan visi "Purwakarta Istimewa" dan misi pembangunan 2025–2029, tujuan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, guna mendukung terhadap delapan misi pembangunan nasional (Asta Cita Presiden). Penyelarasan ini dimaksudkan agar pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2025-2045 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Indikator Kabupaten Purwakarta

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.		
No.	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**
1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Indek Pembangunan Manusia

		Tingkat Kemiskinan (%)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
1.1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (kasus)
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
		Indeks Pembangunan Keluarga
1.1.2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
		Harapan Lama Sekolah (tahun)
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

		Indeks Pembangunan Manusia
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
1.1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)
1.1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
1.1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Indeks Desa
		Persentase Desa Mandiri (%)
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
		Indeks Profesionalitas ASN
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.		
2.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

	ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)
2.1.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
2.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)

2.2	Memperkuat ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
2.2.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)
		Indeks Ketahanan Pangan
Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.		
3.1	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Pertumbuhan Ekonomi
		Tingkat Inflasi (%)
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)
3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)"
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
		Pertumbuhan Ekonomi
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat
		Pertumbuhan UMKM
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
		Tingkat Inflasi (%)
3.1.2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Persentase penanganan trantibumlinmas (%)
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.		
4.1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Opini BPK terhadap laporan keuangan
4.1.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE
		Indeks Inovasi Daerah
		Nilai SAKIP Kabupaten
		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi
		Sistem Merit Kabupaten
		Nilai LPPD Kabupaten
		Opini BPK terhadap laporan keuangan
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)

		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Lebih jauh, strategi pembangunan daerah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kebijakan makro, tetapi juga perlu disertai dengan penahapan pembangunan yang sistematis. Penahapan ini menjadi penting agar pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilakukan secara bertahap, terukur, serta selaras dengan dinamika pembangunan dan kapasitas fiskal daerah.

Dengan adanya penahapan tersebut, strategi tidak hanya menjadi panduan umum, tetapi juga memberikan arah yang lebih jelas mengenai prioritas pembangunan dari waktu ke waktu, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat terwujud secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.

Adapun uraian rumusan strategi untuk mencapai misi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Misi Kesatu
    a. Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan.
    b. Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera.

c. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta Tenaga Pendidik yang Berkualitas.
d. Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat.
e. Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin.
f. Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan.
g. Memperkuat Kerukunan Antar Umat Beragama.
h. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
i. Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan, Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat.

2. Strategi Misi Kedua
   a. Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan, Jembatan dan Air Bersih secara Merata.
   b. Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Jalan dan Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal.
   c. Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata.
   d. Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
   e. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan.
   f. Meningkatkan Upaya Penanggulangan, Pencegahan dan Penyelamatan serta Penanganan Korban Bencana.
   g. Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan.
   h. Meningkatkan Pengelolaan Energi, Sumber Mata Air dan Sarana Prasarana Pertanian.

3. Strategi Misi Ketiga
    a. Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.
    b. Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital
    c. Membangun Iklim Investasi yang Kondusif
    d. Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri.
    e. Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata.
    f. Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi.
    g. Mendorong Peningkatan Akses dan Kesempatan Kerja yang Merata
    h. Memperkuat Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentaman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
4. Strategi Misi Keempat
    a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Berintegritas dan Berbasis Digital

2.1.4. Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 pada Tahap I Periode Pembangunan Tahun 2025 - 2029 yaitu "**Penguatan Fondasi Sosial Ekonomi, SDM dan Infrastruktur Dasar**" yang merupakan tahap awal dalam mewujudkan pencapaian visi pembangunan

jangka panjang, dimana pada tahap ini arah kebijakan pembangunanya difokuskan pada pembangunan fondasi sosial ekonomi, sumber daya manusia dan infrasrtuktur dasar agar dalam mewujudkan kabupaten purwakarta yang "maju" harus dibangun fondasi yang kuat dari aspek strategis tersebut. Penguatan fondasi sosial ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur dasar menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Prioritas Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 terdiri dari 4 prioritas daerah yang masing – masing dijabarkan menjadi 12 Program Prioritas. Kemudian Prioritas Daerah tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya.

Prioritas Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.
    - Program Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan.
    - Program Prioritas 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB.
    - Program Prioritas 3 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Program Prioritas 4 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Prioritas Daerah 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.
   - Program Prioritas 5 : Pengelolaan Lingkungan Ketahanan Bencana
   - Program Prioritas 6 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
   - Program Prioritas 7 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
3. Prioritas Daerah 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.
   - Program Prioritas 8 : Pengembangan Koperasi dan UMKM
   - Program Prioritas 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
   - Program Prioritas 10 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
   - Program Prioritas 11 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Prioritas Daerah 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.

- Program Prioritas 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

2.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Secara umum keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam matrik hubungan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Visi : "Purwakarta Istimewa"		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
1	**2**	**3**
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak.	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua 2. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata 3. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif 4. Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama 5. Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah,	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah.	6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah 7. Meningkatnya

meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.		kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
	3. Memperkuat ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan.	8. Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.
3. Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.	4. Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.	9. Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah. 10. Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah
4. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital.	11. Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

2.1.6. Program

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta

telah menetapkan program-program pembangunan untuk melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan penyelengaraan pembangunan pemerintahan daerah. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1. Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (kasus) 3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) 4. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) 5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Pengendalian Penduduk 6. Pembinaan Keluarga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
	(treatment success rate) (%) 6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 7. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 8. Indeks Pembangunan Keluarga	Berencana (KB) 7. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun) 3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 4. Indeks Pembangunan Manusia 5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan Kurikulum 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra 6. Pembinaan Perpustakaan 7. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
3. Terwujudnya perlindungan sosial yang	1. Tingkat Kemiskinan (%) 2. Persentase	1. Pemberdayaan Sosial 2. Penanganan Warga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
adaptif	Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 3. Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Rehabilitasi Sosial 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1. Pengembangan Kebudayaan 2. Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Pembinaan Sejarah 4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Pengelolaan Permuseuman 6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3. Indeks	1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Perlindungan Perempuan 3. Peningkatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
	Pemberdayaan Gender (IDG) 4. Indeks Desa 5. Persentase Desa Mandiri (%) 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 7. Indeks Profesionalitas ASN	Kualitas Keluarga 4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Perlindungan Khusus Anak 7. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Penataan Desa 9. Peningkatan Kerja Sama Desa 10. Administrasi Pemerintahan Desa 11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 12. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 13. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 14. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 15. Perencanaan Kawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		Transmigrasi 16. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 17. Pengembangan Kawasan Transmigrasi 18. Pengembangan Sumber Daya Manusia 19. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	1. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 2. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Penyelenggaraan Jalan 3. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLLAJ) 4. Pengelolaan Pelayaran 5. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 6. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		7. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 8. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 9. Pengembangan Permukiman 10. Penataan Bangunan Gedung 11. Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 12. Pengembangan Jasa Konstruksi 13. Penyelenggaraan Penataan Ruang 14. Pengembangan Perumahan 15. Kawasan Permukiman 16. Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 17. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 18. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 19. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		20. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 21. Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 22. Pengelolaan Tanah Kosong
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin) 2. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 4. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) 5. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota) 6. Penurunan Emisi	1. Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
	GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH 7. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 8. Pengelolaan Persampahan 9. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 11. Penanggulangan Bencana 12. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		Penyelamatan Non Kebakaran 13. Penanganan Bencana
8. Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	1. Pertumbuhan produksi Listrik (%) 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 3. Kapasitas Air Baku (m3/detik) 4. Indeks Ketahanan Pangan 5. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Penanganan Kerawanan Pangan 4. Pengawasan Keamanan Pangan 5. Pengelolaan Perikanan Tangkap 6. Pengelolaan Perikanan Budidaya 7. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 8. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		10. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Perizinan Usaha Pertanian 12. Penyuluhan Pertanian 13. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 14. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 15. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9. Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%) 3. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 6. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar	1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
	Ekonomi) (poin) 7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 8. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 9. Pertumbuhan Ekonomi 10. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat 11. Pertumbuhan UMKM 12. Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) 13. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB 14. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) 15. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 16. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 17. Tingkat Inflasi (%)	(UMKM) 7. Pengembangan UMKM 8. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 9. Promosi Penanaman Modal 10. Pelayanan Penanaman Modal 11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 12. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 13. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 14. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 15. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 16. Pengembangan Ekspor 17. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 18. Penggunaan dan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		Pemasaran Produk Dalam Negeri 19. Perencanaan dan Pembangunan Industri 20. Pengendalian Izin Usaha Industri 21. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 22. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 23. Pemasaran Pariwisata 24. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 25. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 26. Penempatan Tenaga Kerja 27. Hubungan Industrial
10. Meningkatnya soliditas penanganan	1. Persentase penanganan trantibumlinmas	1. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	(%) 2. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
11. Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Indeks Inovasi Daerah	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pendaftaran Penduduk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
efektif dan efisien	3. Nilai SAKIP Kabupaten 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Indeks Pelayanan Publik 6. Indeks Reformasi Birokrasi 7. Sistem Merit Kabupaten 8. Nilai LPPD Kabupaten 9. Opini BPK terhadap laporan keuangan 10. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 11. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 13. Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) 14. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 15. Efektifitas Kerjasama Internasional (%)	3. Pencatatan Sipil 4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Pengelolaan Profil Kependudukan 6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 7. Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 9. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 10. Pengelolaan Arsip 11. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 12. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 13. Perekonomian dan Pembangunan 14. Pengelolaan Perbatasan 15. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd 16. Perencanaan, Pengendalian dan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
	16. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin) 17. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Evaluasi Pembangunan Daerah 17. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Riset dan Inovasi Daerah 20. Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Pengelolaan Barang Milik Daerah 22. Pengelolaan Pendapatan Daerah 23. Kepegawaian Daerah 24. Penyelenggaraan Pengawasan 25. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 26. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 27. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
		Umum 28. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian kinerja berisi Tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Murni dan Perubahan Kabupaten Purwakarta tahun 2025 dan Dokumen APBD Murni dan Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan perjanjian kinerja yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang selanjutnya pencapaian kinerja tersebut akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Terdapat 2 Perjanjian kinerja yaitu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebelum adanya bupati terpilih dan Perubahan Perjanjian Kinerja pada pertengahan tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Perubahan ini juga guna menyelaraskan target indikator kinerja utama (IKU) dengan program prioritas yang tertuang dalam visi-misi kepala daerah yang baru. Hal ini bertujuan agar instrumen akuntabilitas selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang baru ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja yang baru, maka seluruh jajaran birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati definitif memiliki komitmen legal dan moral untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disepakati. Perubahan ini menjadi titik awal bagi akselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua			
		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,07
		Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (kasus)	Kasus	30,00
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Persen	13,16
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Persen	91,00
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	91,00
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	98,13
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,99
		Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	61,90
2	Sasaran 2 : Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8,15
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	5,56
		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	71,48
3	Sasaran 3 : Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif			
		Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,55 - 8,33
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	5,50
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,365 - 0,372
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	Ribu Rp.	13.221,39
4	Sasaran 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama			
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,22
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	85,80
5	Sasaran 5 : Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,54
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88,08
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	79,35
		Indeks Desa	Skor	482,15
		Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	42,08
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,26
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,94
6	Sasaran 6 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,18
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	81,13
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Persen	91,88
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	83,81
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	30,03
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	60,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
7	Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	Poin	64,23
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	7,08
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	3,60
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	Persen	79,71
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	Indeks	90,00
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton Co2eq	279.711,36
8	Sasaran 8 : Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan			
		Pertumbuhan produksi Listrik (%)	Persen	9,60
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	4,21
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	3,18
		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,98
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,57

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
9	Sasaran 9 : Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah			
		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	58,36
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1,16
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	2,98
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	6,9 - 7,51
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	46,50
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)	Poin	71,32
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	23,32
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	19,85
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 - 5,19
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	86,43
		Pertumbuhan UMKM	Persen	1,55
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Juta Rp.	84,92 - 85,28
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Persen	69,24

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Trilyun Rp.	8,46
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,20
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	10,52
		Tingkat Inflasi (%)	Persen	0,91
10	Sasaran 10 : Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah			
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	Persen	100,00
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00
11	Sasaran 11 : Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien			
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,97
		Indeks Inovasi Daerah (poin)	Poin	49,40
		Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	66,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,39
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,62
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85,23
		Sistem Merit Kabupaten	Poin	284,30
		Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,4147
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP
		Rasio Kapasitas Fiskal	Poin	1,274

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Daerah		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80,746
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,108
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Poin	3,209
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,77
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)	Persen	100,00
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	Poin	44,65
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Poin	94,72

Tabel 2.5

Program dan Anggaran Perubahan 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	946.139.350
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	24.454.608.216
3	Program Hubungan Industrial	201.051.900
4	Program Kawasan Permukiman	45.036.873.000
5	Program Kepegawaian Daerah	3.635.523.000
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	837.915.250
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.727.180
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.239.828.290
9	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	164.947.500
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	103.486.900
11	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	77.220.000
12	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	59.473.650
13	Program Pemasaran Pariwisata	75.829.000
14	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	95.995.500
15	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	422.020.000
16	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.561.951.000
17	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	670.890.900
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	596.184.270

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.250.454.759
20	Program Pemberdayaan Sosial	679.341.502
21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	431.381.500
22	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	420.887.932
23	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	542.520.200
24	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	122.394.250
25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	8.859.007.544
26	Program Pembinaan Perpustakaan	1.263.683.837
27	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	71.840.000
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.926.532.758
29	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.232.083.089
30	Program Penanganan Bencana	376.247.000
31	Program Penanganan Kerawanan Pangan	42.484.500
32	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	193.956.100
33	Program Penanggulangan Bencana	1.577.310.500
34	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	107.255.000
35	Program Penataan Bangunan Gedung	19.421.480.500
36	Program Penataan Desa	69.817.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
37	Program Pencatatan Sipil	20.395.000
38	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.807.067.500
39	Program Pendaftaran Penduduk	248.308.000
40	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	36.078.000
41	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	329.920.500
42	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	911.015.000
43	Program Penempatan Tenaga Kerja	328.834.000
44	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	75.000.000
45	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	236.934.500
46	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	206.138.000
47	Program Pengawasan Keamanan Pangan	94.610.750
48	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	10.445.000
49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.514.115.500
50	Program Pengelolaan Arsip	452.398.800
51	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.396.838.500
52	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.336.295.456
53	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	13.803.609.766
54	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.705.451.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
55	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	113.484.000
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.222.500
57	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.177.895.000
58	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	108.393.000
59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	363.594.377.859
60	Program Pengelolaan Pelayaran	160.000.000
61	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.101.542.700
62	Program Pengelolaan Pendidikan	203.744.350.196
63	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	557.543.124
64	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	376.501.785
65	Program Pengelolaan Permuseuman	49.718.000
66	Program Pengelolaan Persampahan	19.925.038.910
67	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	4.248.000
68	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	28.579.500
69	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	22.740.000
70	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	24.632.394.000
71	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	20.296.250
72	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	190.154.000
73	Program Pengelolaan Tanah Kosong	19.367.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
74	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	360.508.500
75	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	229.255.000
76	Program Pengembangan Ekspor	86.782.000
77	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	58.054.925
78	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	221.772.500
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.134.502.900
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	583.077.500
81	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000
82	Program Pengembangan Kebudayaan	3.693.589.350
83	Program Pengembangan Kurikulum	365.500.000
84	Program Pengembangan Perumahan	10.995.247.000
85	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	699.292.500
86	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.989.902.150
87	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	740.268.000
88	Program Pengembangan Umkm	851.318.716
89	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	222.090.500
90	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	12.911.000
91	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	379.868.046
92	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	108.027.500

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
93	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.548.252.226
94	Program Pengendalian Penduduk	316.086.000
95	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	22.796.000
96	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.989.000
97	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.623.000
98	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	324.303.980
99	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.605.424.485
100	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	80.637.000
101	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	717.273.500
102	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	776.792.500
103	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.777.905.000
104	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.328.216.800
105	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.347.149.287
106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.161.895.500
107	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70.498.900
108	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	146.332.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
109	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.176.287.500
110	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	17.140.180.250
111	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.185.000
112	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.600.956.592.941
113	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	866.417.500
114	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.268.676.250
115	Program Penyelenggaraan Jalan	148.100.123.492
116	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	17.235.281.771
117	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	638.130.993
118	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.484.347.000
119	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.543.716.500
120	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	611.089.000
121	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	472.861.000
122	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.092.005.975
123	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	52.640.750
124	Program Penyuluhan Pertanian	2.005.251.000
125	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.018.529.456

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
126	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	546.945.250
127	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	30.457.500
128	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	180.213.000
129	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.630.511.500
130	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	40.584.500
131	Program Perizinan Usaha Pertanian	28.075.000
132	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.214.312.235
133	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	53.483.000
134	Program Perlindungan Perempuan	186.769.000
135	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	692.858.000
136	Program Promosi Penanaman Modal	99.180.000
137	Program Rehabilitasi Sosial	584.455.800
138	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	304.484.000
139	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	277.908.500
140	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	123.828.200
JUMLAH ANGGARAN		**2.786.085.169.101**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

- Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan

masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

- Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
- Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai capaian kinerja digunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJMD dan RKPD sebagai berikut :

TABEL 3.1

SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA

No	Interval Nilai	Kriteria
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah.

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja.

Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahannya, adalah sebagai berikut :

Pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Purwakarta pada awal tahun 2025, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPD 2024 - 2026 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Dari 17 sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Purwakarta. 17 sasaran tersebut memiliki 48 indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 2 sasaran dengan 7 indikator kinerja sasaran untuk Misi I, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran untuk Misi II, 6 sasaran dengan 17 indikator kinerja sasaran untuk Misi III, 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran untuk Misi IV, dan 4 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran untuk Misi V.

Pada awal tahun anggaran 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 17 sasaran dengan menggunakan 48 indikator kinerja sasaran, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Seiring ditetapkannya kepala daerah Kabupaten Purwakarta, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama enam bulan setelah penetapan kepala daerah yang akan menjadi landasan arah pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah.

Dengan begitu, pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Purwakarta mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2025, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2025-2029. Sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perubahan

Penetapan Kinerja Kabupaten Purwakarta.

Secara keseluruhan penetapan kinerja Kabupaten Purwakarta memiliki 11 sasaran yang ditetapkan 79 indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 5 sasaran dengan 26 indikator kinerja sasaran untuk Misi I, 3 sasaran dengan 17 indikator kinerja sasaran untuk Misi II, 2 sasaran dengan 19 indikator kinerja sasaran untuk Misi III, dan 1 sasaran dengan 17 indikator kinerja sasaran untuk Misi IV.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada masing-masing misi.

MISI I

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, UNGGUL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF SERTA MEMILIKI KARAKTER DAN AKHLAK YANG BAIK.

SASARAN 1 :

Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua

Sasaran ini diukur oleh Usia Harapan Hidup (UHH), Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita, Cakupan penemuan kasus tuberculosis (treatment coverage), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate), Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Indeks Pembangunan Keluarga. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, RSUD Bayu Asih dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Merupakan indikator untuk mengukur kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH juga digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren peningkatan UHH dari tahun ke tahun, yang mencerminkan perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dasar, pola hidup sehat, serta keberhasilan berbagai program kesehatan masyarakat. Peningkatan ini diupayakan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk Puskesmas dengan layanan rawat inap, rumah sakit berkualitas, serta program kesehatan berbasis komunitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini turut didukung oleh peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan.

Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2025 yaitu 75,28 tahun atau sebesar 100,28% bila dibandingkan dengan target yaitu 75,07 tahun. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu indikator ini mengalami penurunan capaian sebesar 3,76%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, UHH Kabupaten Purwakarta lebih besar 0,12 poin. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan dalam aspek kesehatan, gizi, dan layanan publik yang berdampak pada kualitas hidup penduduk. Tren ini penting dalam perencanaan pembangunan karena berkaitan erat dengan struktur demografi dan kebutuhan layanan untuk kelompok usia lanjut. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup. Namun, tetap perlu ada upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk memperpanjang usia harapan hidup.

b. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun

Angka kematian ibu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, akses transportasi, kondisi geografis, serta kualitas pencatatan kematian. Jumlah kasus kematian ibu per tahun pada Kabupaten Purwakarta tahun 2025 sebanyak 12 kasus dari target maksimal yang ditetapkan yaitu sebanyak 30 kasus. Realisasi tahun ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu (21 kasus). Artinya, capaian sudah lebih baik dari baseline sebelumnya. Dengan kata lain, indikator menunjukkan tren positif karena jumlah kasus menurun hampir 43% dibanding tahun lalu, sekaligus mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi kesehatan ibu yang telah dilaksanakan.

Faktor keberhasilan penurunan jumlah kasus kematian ibu per tahun diantaranya Efektivitas program kesehatan ibu dengan menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh faktor keterlibatan masyarakat (edukasi oleh kader kesehatan dan dukungan keluarga dalam memantau kehamilan berisiko) dan komitmen pemerintah daerah dengan menyediakan dukungan anggaran dan kebijakan Bupati yang menempatkan kesehatan ibu sebagai prioritas.

Secara substansi, capaian tahun ini menunjukkan keberhasilan nyata karena jumlah kasus menurun dibanding tahun lalu. Namun, masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kegagalan capaian tersebut diantaranya penetapan target (30 kasus) tidak sejalan dengan tren penurunan kasus, sehingga capaian terlihat “kurang” meski hasilnya positif, secara data ada kemungkinan *under-reporting* atau pencatatan yang belum optimal bisa memengaruhi akurasi capaian dan realisasi jumlah

ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang maksimal yaitu sebesar 62,10%.

c. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Stunting dipilih sebagai indikator prioritas karena merupakan masalah gizi kronis yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan menurunkan angka stunting menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Indikator prevalensi stunting pada balita merupakan prioritas utama dalam perjanjian kinerja Bupati. Target penurunan ditetapkan sebesar 13,16% pada tahun berjalan dari baseline 14,50%. Upaya yang dilakukan meliputi intervensi gizi spesifik, Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Hasil capaian menunjukkan penurunan prevalensi dari 14,50% menjadi 2,87%. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan dukungan tenaga kesehatan. Strategi ke depan difokuskan pada penguatan data, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.

d. Cakupan penemuan kasus tuberculosis (treatment coverage)

Indikator treatment coverage atau cakupan penemuan kasus TB digunakan secara internasional untuk mengukur sejauh mana sistem kesehatan mampu mendeteksi kasus TB dari estimasi jumlah kasus yang ada di masyarakat. WHO menetapkan bahwa cakupan penemuan kasus yang tinggi (>90%) atau penemuan kasus dini dan pengobatan tuntas merupakan syarat penting untuk menurunkan insidensi TB dan memutus rantai penularan.

Pada tahun 2025, indikator cakupan penemuan kasus Tuberculosis (treatment coverage) ditetapkan dengan target sebesar 91, dengan baseline capaian tahun 2024 sebesar 91. Realisasi capaian tahun 2025 menunjukkan angka 92,78, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1,78 poin. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas program penemuan kasus TB serta keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam memperkuat sistem kesehatan daerah.

Dengan capaian 92,78, Kabupaten telah memenuhi standar global dalam hal cakupan penemuan kasus, yang berarti sebagian besar kasus TB di masyarakat berhasil ditemukan dan masuk ke dalam sistem pengobatan. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan sistem kesehatan, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat.

Namun demikian, tantangan berupa kepatuhan pasien dan mobilitas penduduk tetap perlu diantisipasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten akan terus memperkuat strategi penemuan kasus TB melalui peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan jejaring komunitas, dukungan kebijakan dan anggaran berkelanjutan, sehingga capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, serta mendukung pencapaian target eliminasi TB sesuai komitmen nasional dan global.

e. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Indikator treatment success rate digunakan secara internasional untuk mengukur persentase pasien TB yang menyelesaikan pengobatan sesuai standar. WHO menetapkan bahwa angka keberhasilan pengobatan TB yang baik adalah ≥85%, karena angka tersebut dianggap cukup untuk menurunkan risiko resistensi obat dan memutus rantai penularan. Dengan capaian

94,17, Kabupaten telah melampaui standar WHO dan menunjukkan kualitas pengelolaan pengobatan TB yang sangat baik dibandingkan baseline tahun 2024. Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan kepatuhan pasien, ketersediaan obat yang konsisten, kualitas layanan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, tantangan berupa resistensi obat, kepatuhan pasien, keterbatasan anggaran, dan komorbiditas tetap perlu diantisipasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memperkuat strategi pengobatan TB melalui pengawasan ketat pasien, dukungan sosial-ekonomi, penguatan layanan kesehatan, serta integrasi program TB dengan penanganan penyakit komorbid. Dengan strategi berkelanjutan, capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus berkontribusi pada target eliminasi TB nasional tahun 2030 sesuai komitmen global WHO.

f. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Menurut teori kebijakan kesehatan publik, cakupan kepesertaan JKN adalah indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi *Universal Health Coverage* (UHC). UHC dicapai apabila seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Dengan capaian 101%, Kabupaten tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan.

Realisasi capaian indikator cakupan kepesertaan JKN tahun 2025 sebesar 101% menunjukkan keberhasilan Bupati dalam

melampaui target yang telah ditetapkan dan meningkatkan capaian dibandingkan baseline tahun 2024. Keberhasilan ini didorong oleh kebijakan daerah yang proaktif, kolaborasi lintas sektor, sosialisasi masyarakat, serta pemanfaatan digitalisasi layanan.

Namun demikian, tantangan berupa kepatuhan pembayaran iuran dan kualitas layanan kesehatan tetap perlu diantisipasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten akan memperkuat strategi kepesertaan JKN melalui peningkatan pendataan penduduk, pengawasan kepatuhan iuran, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Dengan strategi berkelanjutan, capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus berkontribusi pada target Universal Health Coverage Indonesia tahun 2026–2030 sesuai komitmen global WHO.

g. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk tahun 2026 sebanyak 1.075.243 jiwa, yang terdiri atas 544.524 jiwa penduduk laki-laki dan 530.719 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,31. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Babakancikao sebesar 1,94. Sedangkan Laju pertumbuhan penduduk terrendah yaitu Kecamatan Purwakarta sebesar 0,64. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2026 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,6. Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2026 (Juni).

h. Indeks Pembangunan Keluarga

Adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga. IPK mencakup tiga dimensi utama yaitu Ketentraman dan Keharmonisan (Relasi antar anggota keluarga, komunikasi, dan ketahanan psikologis), Kesejahteraan (Kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga), Ketahanan (Kemampuan keluarga menghadapi masalah, menjaga nilai, dan beradaptasi dengan perubahan). IPK digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan keluarga, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Pada tahun 2025, capaian IPK menunjukkan hasil 62,70, melampaui target yang ditetapkan sebesar 61,90 dan meningkat signifikan dari baseline tahun 2024 sebesar 61,63. Pencapaian ini mencerminkan program pembangunan keluarga yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas keluarga dalam aspek kesejahteraan, ketentraman, dan ketahanan keluarga.

SASARAN 2 :

Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

a. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)

didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui metode survey. Indikator Rata-rata Lama Sekolah merupakan salah satu ukuran penting dalam pembangunan manusia, khususnya dalam dimensi pendidikan.

Kualitas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Purwakarta pada tahun 2025 adalah 8,37 tahun dari target 8,15

tahun dengan tingkat capaian sebesar 102,70%. Bila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2024 (8,14 tahun dari target 9,23 tahun), terjadi surplus capaian sebesar 0,22 poin atau sebesar 14,51% dari tahun sebelumnya (88,19%). Bila dilihat dari perspektif target akhir perencanaan, indikator ini mencapai 16,88%. Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat lebih rendah 0,77 poin.

Secara umum, capaian kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta menunjukkan hasil yang cukup baik dengan banyak indikator yang berhasil melampaui target. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,37 berarti rata-rata penduduk usia dewasa telah menempuh pendidikan hingga setara kelas 2 SMP. Capaian ini menandakan keberhasilan kebijakan daerah dalam memperluas akses pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jenjang pendidikan menengah.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah belum optimalnya Angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B. Hal ini juga sejalan dengan masih terdapat Angka Putus Sekolah pada tingkat SMP/MTs. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan dasar juga masih relatif belum mencapai target, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan aksesibilitas, Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kualitas Pendidikan juga tetap harus menjadi fokus perbaikan agar capaian kuantitatif sejalan dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan.

b. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya waktu bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang; dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah mengukur ekspektasi sistem pendidikan terhadap durasi pendidikan generasi mendatang, bukan pengalaman aktual individu saat ini.

HLS merefleksikan akses, retensi, dan kebijakan Pendidikan, kenaikan HLS diasosiasikan dengan peningkatan human capital, potensi pendapatan masa depan, dan indikator pembangunan sosial-ekonomi. Namun HLS tidak langsung mengukur mutu pembelajaran (*learning outcomes*) sehingga perlu dilengkapi indikator kualitas.

Capaian realisasi Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 adalah 12,51 tahun atau sebesar 101,96%. Apabila dilihat dari realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan 0,26 poin dari sebelumnya sebesar 12,25 poin menjadi 12,51 poin. Bila dibandingkan dengan target akhir rencana Pembangunan daerah, indikator ini mencapai 16,99%. Posisi indikator ini lebih rendah 0,51 poin dari capaian Jawa Barat (13,02).

c. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah persentase penduduk ≥15 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor) dibandingkan dengan total penduduk usia tersebut. indikator ini mencerminkan stok modal manusia terdidik yang menjadi motor penggerak pembangunan. Teori human capital menekankan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas individu dan daya saing ekonomi. Namun, proporsi pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin kualitas keterampilan (skills quality) atau relevansi dengan pasar kerja. Oleh karena itu, indikator ini harus dilihat bersama dengan data ketenagakerjaan,

inovasi, dan outcome pembelajaran.

Realisasi 12,51% menunjukkan keberhasilan melampaui target 12,27%, sekaligus peningkatan dari baseline 12,25%. Namun, capaian ini harus dipandang sebagai awal dari proses panjang: memastikan pemerataan, relevansi keterampilan, dan kualitas pendidikan tinggi agar benar-benar mendukung pembangunan daerah. Dengan strategi berkelanjutan, indikator ini dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

d. **Indeks Pembangunan Manusia**

Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan stadar hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian IPM terdapat peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat realisasi IPM pada tahun 2024 sebesar 74,97 dari target 74,06 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,23%. Bila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2023 (72,99), terjadi peningkatan sebesar 0,98 poin. Tetapi bila dibandingkan dari hasil capaiannya, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya (101,37). Bila dilihat dari perspektif target akhir perencanaan, indikator ini mencapai 16,87%. Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat lebih rendah 0,93 poin. Akan tetapi, Kabupaten Purwakarta memiliki IPM tertinggi diantara kabupaten di sekelilingnya.

e. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat secara komprehensif. Literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup Literasi dasar (kemampuan membaca, menulis, berhitung), Literasi informasi (kemampuan mencari, memahami, dan menggunakan informasi), Literasi digital (kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara produktif) dan Literasi finansial, sains, dan budaya (kemampuan memahami aspek kehidupan modern secara kritis dan adaptif.

Menurut teori pembangunan literasi, peningkatan indeks literasi masyarakat berkorelasi dengan Kualitas sumber daya manusia (SDM), Produktivitas ekonomi, Partisipasi sosial dan politik, dan Kemampuan adaptasi terhadap perubahan global.

Pada tahun 2025, target capaian IPLM ditetapkan sebesar 71,48 dengan baseline tahun 2024 sebesar 70,98. Realisasi yang dicapai adalah 1,82. Rendahnya capaian ini dampak dari penerapan metode perhitungan baru untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang mulai disempurnakan pada tahun 2025 oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Rekomendasi langkah selanjutnya yaitu dengan mengusulkan konversi hasil capaian penilaian dari metode perhitungan lama ke metode perhitungan baru atau dengan melakukan penyesuaian target pada RPJMD.

SASARAN 3 :

Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif

a. Tingkat kemiskinan

menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Angka ini diperoleh dari

hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 sebanyak 76,50 ribu orang dengan persentase 7,87% dari populasi penduduk, terjadi penurunan sebanyak 0,54% dari tahun 2024 sebanyak 8,41%. Dimana garis kemiskinan Kabupaten Purwakarta adalah 483.968 rupiah/perkapita/perbulan.

Apabila dilihat dari perspektif target akhir RPJMD sebesar 16,81%. Dan bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat, Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta lebih besar 0,85%.

b. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penyandang disabilitas memperoleh kesempatan kerja yang layak di sektor formal. Peningkatan dari baseline 4,00 menuju target 5,50 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Sektor formal dipilih karena memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, serta akses terhadap pengembangan karier yang lebih berkelanjutan dibandingkan sektor informal. Capaian akan bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, dukungan dunia usaha, serta kesiapan penyandang disabilitas dalam memenuhi kompetensi kerja. Faktor keberhasilan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan dunia usaha, sementara faktor kegagalan terutama terkait dengan stigma sosial dan lemahnya implementasi regulasi.

Capaian Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 0,20%. Hal ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 5,50%. Dari total jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 80.649 orang, hanya

sebanyak 165 orang tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal.

c. Indeks Gini / Ketimpangan Pendapatan

merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur distribusi kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini diukur menggunakan Indeks Gini atau Gini Rasio, yang menunjukkan seberapa merata pendapatan atau pengeluaran di antara penduduk. Skala Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata (setiap individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu individu memiliki seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki pendapatan sama sekali). Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan, yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada tahun 2025, Indeks Gini Kabupaten Purwakarta menurun menjadi 0,369. Terdapat penurunan sebesar 0,029 poin yang menunjukkan tren positif dalam penurunan ketimpangan pendapatan. Realisasi tahun 2025 sebesar 0,369 berada dalam rentang target (0,365–0,372) dan lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya (0,398). Hal ini menandakan adanya perbaikan distribusi pendapatan masyarakat, dengan ketimpangan yang semakin mengecil. Keberhasilan ini perlu dijaga dengan memperkuat program pemberdayaan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan, serta mengantisipasi faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan ketimpangan.

d. Pengeluaran Perkapita disesuaikan

Realisasi sebesar 13.400 melampaui target 13.221,39. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah berhasil

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ini juga menandakan adanya perbaikan daya beli rumah tangga, yang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan lokal, serta industri kecil dan menengah menjadi motor penggerak utama. Program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur jalan dan pasar tradisional juga mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat sehingga pengeluaran riil tetap meningkat. Masuknya investasi baru, baik dari pemerintah maupun swasta, membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Walaupun target tercapai, terdapat faktor yang berpotensi menghambat keberlanjutan capaian. Peningkatan pengeluaran perkapita bisa tidak merata antar kelompok masyarakat, sehingga masih ada kantong-kantong kemiskinan. Ketergantungan pada Sektor Tertentu, jika pertumbuhan hanya ditopang oleh sektor pertanian atau perdagangan, maka rentan terhadap guncangan harga komoditas. Risiko Inflasi di Masa Depan, Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menggerus daya beli masyarakat. Dampak Eksternal, Perubahan kebijakan nasional, kondisi global (misalnya fluktuasi harga minyak), atau bencana alam dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan pada Kualitas Infrastruktur & SDM, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka capaian ekonomi bisa stagnan.

SASARAN 4 :

Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

IPK adalah alat ukur komposit untuk memetakan kemajuan pembangunan kebudayaan secara objektif dan berkelanjutan; dipakai sebagai basis formulasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Dimensi utama umumnya mencakup Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Pendidikan & Literasi Budaya, dan Ekonomi Budaya; setiap dimensi diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang terstandar. IPK berfungsi untuk memandu prioritas kebijakan, alokasi anggaran, dan evaluasi program pemajuan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota.

Pencapaian target menunjukkan perencanaan target yang realistis dan/atau implementasi program yang efektif pada periode pelaporan. Kenaikan +0,57 poin dari tahun lalu menandakan adanya perbaikan marginal pada salah satu atau beberapa dimensi IPK. angka stabil di kisaran 57 menempatkan daerah pada level perkembangan kebudayaan yang moderat; bukan lonjakan signifikan, sehingga perlu fokus pada peningkatan kualitas intervensi bukan sekadar kuantitas program. Hal ini dapat dianalisakan bahwa koordinasi antar-dinas (kebudayaan, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif) meningkatkan efektivitas program, IPK memang dirancang untuk mendorong koordinasi lintas sektor. Kegiatan pelestarian warisan, pelatihan, dan dukungan ekonomi budaya juga turut serta meningkatkan skor dimensi terkait.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indeks kuantitatif 0–100 yang mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama berdasarkan indikator utama seperti toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama. Indeks ini dikembangkan sebagai alat pemantauan kondisi kerukunan di tingkat nasional dan daerah. Indeks ini berfungsi sebagai Alat evaluasi kebijakan, early warning, dan dasar alokasi program

untuk meningkatkan harmoni sosial-keagamaan. Metodologi umumnya berbasis survei dan agregasi indikator.

Pada tahun kinerja 2025, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan target Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 85,80. Realisasi capaian menunjukkan angka 89,00, atau selisih 3,2 poin dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana IKUB berada pada angka 76,47 dengan target 77,95. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 12,53 poin dalam satu tahun, yang mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan yang dijalankan.

Keberhasilan peningkatan IKUB tidak terlepas dari beberapa faktor utama diantaranya Kebijakan proaktif pemerintah daerah melalui program dialog lintas agama, fasilitasi kegiatan keagamaan Bersama dan kesadaran masyarakat. Kolaborasi lintas sektor antara Pemda, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil yang menciptakan jejaring sosial kuat untuk menjaga kerukunan. Monitoring dan evaluasi berbasis data yang dilakukan secara berkala, sehingga kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

SASARAN 5 :

Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan

a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana terdapat ketimpangan antara laki-laki dan

perempuan dalam pencapaian pembangunan manusia. Dimensi utama IKG diantaranya Kesehatan reproduktif (mortalitas ibu, angka kelahiran remaja), Pemberdayaan (keterwakilan perempuan di parlemen, tingkat pendidikan menengah dan tinggi) dan Partisipasi ekonomi (tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding laki-laki). Apabila nilai IKG mendekati 0 menunjukkan kesetaraan yang tinggi, sedangkan jika nilai IKG mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Upaya yang dilakukan telah memberikan dampak positif, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, tantangan besar masih terdapat pada aspek ekonomi dan budaya. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan, memperluas program pemberdayaan, dan mengatasi hambatan struktural agar capaian IKG dapat terus menurun secara konsisten di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, diharapkan kesetaraan gender tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga terwujud nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Capaian realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purwakarta tahun 2025 belum rilis berdasarkan dari data BPS Kabupaten Purwakarta.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari 3 dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender dipengaruhi oleh Peningkatan Pengeluaran Perkapita Perempuan, Peningkatan Angka Harapan Lama sekolah Perempuan,

Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan dan Peningkatan Angka Harapan Hidup Perempuan.

Capaian realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purwakarta tahun 2025 yaitu 88,57 poin atau sebesar 100,45%. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, indikator ini mengalami kenaikan. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029, indikator ini telah mencapai 92,36%.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

merupakan indikator yang menggambarkan adanya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dan digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada 3 dimensi yaitu (1) Keterwakilan di Parlemen dengan indikator Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-laki dan Perempuan; (2) Pengambilan Keputusan dengan indikator Proporsi dari Manajer, Staf Administrasi, Pekerja Profesional, dan Teknisi Laki-laki dan Perempuan; serta (3) Dimensi Distribusi Pendapatan dengan indikator Upah Buruh Non Pertanian Laki-laki dan Perempuan.

Capaian realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Purwakarta tahun 2025 belum rilis berdasarkan dari data BPS Kabupaten Purwakarta.

d. Indeks Desa

Indeks Desa merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan desa berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks ini menjadi salah satu indikator strategis dalam pembangunan daerah, karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat desa serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Target 482,15 pada tahun 2025 ditetapkan berdasarkan proyeksi

capaian pembangunan desa yang realistis sesuai dengan alokasi anggaran, program prioritas, serta kapasitas kelembagaan desa.

Realisasi sebesar 509,78 menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya sesuai rencana, tetapi juga melampaui ekspektasi. Deviasi positif sebesar 27,63 poin menandakan adanya efektivitas kebijakan, optimalisasi sumber daya, serta partisipasi masyarakat desa yang lebih tinggi dari perkiraan awal.

Meskipun capaian melampaui target, terdapat beberapa kendala yang perlu dicermati yaitu Ketimpangan Antar Desa yang berarti tidak semua desa mengalami peningkatan yang merata, Keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, Desa dengan kondisi geografis sulit masih menghadapi hambatan dalam distribusi layanan public dan Pembangunan desa masih sangat bergantung pada transfer dana pemerintah, sehingga belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi.

e. Persentase Desa Mandiri (%)

Desa mandiri adalah status desa yang menunjukkan tingkat kemandirian tinggi berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengukur dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola. Persentase desa mandiri adalah proporsi desa dalam wilayah yang memenuhi kriteria tersebut. Capaian Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purwakarta tahun 2025 sebesar 52,46% adalah prestasi yang signifikan dan melebihi target, namun perlu verifikasi kualitas kemandirian dan kebijakan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat. Karena jika target dipandang sebagai ambang minimal, realisasi >10 poin di atas target menandakan capaian strategis; namun perlu verifikasi mutu (apakah perubahan status desa benar-benar mencerminkan kemandirian substantif atau hanya administratif).

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

merupakan persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia.

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Purwakarta yaitu 805.863 jiwa, yang terdiri dari 533.867 angkatan kerja dan 271.996 bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,25%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,54% pada tahun 2025. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, pencari kerja sebanyak 17.178 orang dan penempatan tenaga kerja sebanyak 2.442 orang pada tahun 2025.

Target tahun berjalan Kabupaten Purwakarta tidak tercapai dengan selisih negatif 1,01 poin. Dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan tipis sebesar 0,37 poin, meskipun target tahun lalu jauh lebih tinggi (82,22%), sehingga terdapat indikasi ketidaksesuaian antara target dan tren capaian riil. Penurunan TPAK dapat mencerminkan berkurangnya tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan. Faktor penyebab bisa berupa migrasi keluar daerah, discouragement effect (putus asa mencari kerja), atau meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak masuk angkatan kerja (misalnya melanjutkan pendidikan atau mengurus rumah tangga).

TPAK Kabupaten Purwakarta masih berada di bawah angka nasional sebesar 70,59% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 66,99% pada tahun 2025, lebih kecil 0,74 poin. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, TPAK Kabupaten Purwakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karawang (65,13%) dan Kabupaten

Bogor (65,18%), tetapi masih tertinggal dari Kabupaten Subang (68,91%) dan Kabupaten Cianjur (68,88%).

g. Indeks Profesionalitas ASN

merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya,

Hasil pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 sebesar 84,90. Capaian realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 karena perbedaan satuan target.

MISI II

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKARAKTER DAN MERATA DI SELURUH WILAYAH, MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN, SERTA MEMPERKUAT KETAHANAN ENERGI, AIR DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN.

SASARAN 6 :

Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah

a. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

merupakan indikator yang menyatakan Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang dibandingkan dengan total jalan kabupaten.

Hasil capaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota pada tahun 2025 sebesar 95,80 dengan realisasi 81,60 dari target 85,18. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 15,97%.

Pada tahun 2025, panjang jalan di Kabupaten Purwakarta yaitu

776,385 km yang terdiri dari 513,080 km jalan aspal, 44,180 km jalan kerikil, 1,900 km jalan tanah, dan 217,225 jalan lainnya. Secara keseluruhan, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang (kondisi jalan mantap) adalah sepanjang 633,795 Km.

b. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Rasio Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten/Kota adalah perbandingan antara jumlah bangunan yang memiliki IMB yang sah dengan total jumlah bangunan di wilayah tersebut yang dinyatakan dalam rasio/ persentase. Indikator ini merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek penataan ruang, legalitas pembangunan, serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perizinan. Menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kepatuhan terhadap perizinan merupakan bentuk legitimasi pembangunan. Rasio kepatuhan yang tinggi mencerminkan keteraturan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

Capaian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebesar 69,56 menunjukkan adanya penurunan kepatuhan dibanding tahun sebelumnya dan belum memenuhi target 81,13. Kondisi ini menuntut adanya langkah korektif yang sistematis, baik dari sisi data, pelayanan, maupun penegakan hukum. Menurunnya kepatuhan dapat menimbulkan risiko pembangunan ilegal, ketidakteraturan tata ruang, serta potensi masalah hukum.

Untuk mencapai target ideal, perlu melakukan reformasi perizinan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Melakukan Evaluasi berkala dan pelaporan kuartalan agar akuntabilitas kinerja Bupati dapat terjaga dan perbaikan dapat terukur secara nyata.

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak mengukur proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang aman, dapat diandalkan, dan memenuhi standar layanan (akses, ketersediaan, kualitas). Akses air minum layak mencakup Sumber terlindungi (jaringan perpipaan, sumur terlindungi, mata air terlindungi, atau air kemasan yang memenuhi standar), Ketersediaan berkelanjutan (air tersedia setiap hari dalam jumlah cukup untuk kebutuhan dasar rumah tangga) dan Kualitas aman (bebas dari kontaminasi mikrobiologis dan kimia berbahaya).

Target capaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dalam perjanjian kinerja Bupati ditetapkan sebesar 91,88%, dengan baseline tahun 2024 sebesar 91,02%. Namun, realisasi tahun berjalan hanya mencapai 79,85%, sehingga terjadi penurunan signifikan dibanding baseline dan terdapat gap sebesar 12,03 poin persentase terhadap target. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah korektif yang sistematis dan terukur untuk memastikan keberlanjutan layanan air minum layak bagi masyarakat.

Untuk menutup kesenjangan capaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyeluruh, melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat. Penurunan capaian dari baseline 91,02% menjadi 79,85% menunjukkan adanya masalah struktural yang harus segera ditangani.

d. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas

sanitasi yang aman, terpisah dari sumber air minum, dan pengelolaan limbah yang sesuai standar kesehatan lingkungan. Indikator ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG 6 (akses air bersih dan sanitasi untuk semua).

Capaian Kabupaten Purwakarta sebesar 83,01% menunjukkan bahwa akses sanitasi layak telah relatif tinggi, namun belum memenuhi target 83,81%. Stagnasi terhadap baseline menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih tajam, peningkatan kualitas fasilitas, pemerataan layanan, serta percepatan perubahan perilaku masyarakat. Dengan langkah korektif yang terintegrasi, target di tahun berikutnya dapat lebih realistis tercapai sekaligus mendukung komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

e. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan didefinisikan sebagai persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses langsung (*on-premises*) ke air siap minum melalui jaringan perpipaan resmi (misal PDAM) yang tersedia setiap saat dan memenuhi standar kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

Capaian indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan pada Perjanjian Kinerja Bupati menunjukkan realisasi 27,78% terhadap target 30,03%, dengan baseline 2024 sebesar 27,78%; terdapat selisih -2,25 poin persentase, sehingga diperlukan intervensi terfokus pada perluasan jaringan perpipaan, peningkatan kualitas layanan PDAM, dan penguatan pembiayaan serta koordinasi lintas sektor.

f. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Hunian layak bukan sekadar tempat tinggal, melainkan fondasi kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Target capaian sebesar 60,94 tidak tercapai. Realisasi hanya mencapai 59,20, sama dengan baseline tahun 2024. Selisih capaian sebesar -1,74 poin menunjukkan stagnasi, tanpa adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Stagnasi ini menandakan bahwa program intervensi belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses hunian layak. Hambatan struktural, keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal menjadi penyebab utama tidak tercapainya target.

SASARAN 7 :

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)

adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Indikator ini diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan metode survey.

Pada tahun 2025, pencapaian IKLH sebesar 108,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 18,36%. Dan apabila dilihat dari konteks perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), indikator ini telah mencapai 18,16%.

b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)

didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang mencegah kontak manusia dengan ekskreta dan memastikan pengelolaan ekskreta hingga pembuangan akhir yang aman. Kriteria sanitasi aman meliputi: fasilitas toilet yang layak (tidak terbuka), sistem penampungan atau pengolahan tinja yang memenuhi standar teknis, mekanisme pengosongan dan pengangkutan limbah tinja yang aman, serta pembuangan atau pengolahan akhir yang tidak mencemari lingkungan atau sumber air. Indikator ini mengukur aspek ketersediaan infrastruktur, kualitas pengelolaan limbah, dan keberlanjutan layanan sanitasi di tingkat rumah tangga.

Penanggung jawab teknis indikator ini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan sebagian program infrastruktur sanitasi, koordinasi antar OPD terkait (Kesehatan, DPUTR, Dinas Sosial, Bapperida), serta pemantauan dan pelaporan capaian indikator.

Perbandingan target dan realisasi menunjukkan capaian di bawah target sebesar 2,97 poin. Selisih ini menjadi fokus utama analisa akuntabilitas karena berdampak pada capaian tujuan kesehatan masyarakat dan target RPJMD terkait akses sanitasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa program-program yang direncanakan tidak sepenuhnya terealisasi atau tidak menghasilkan dampak yang diharapkan pada tingkat rumah tangga.

Kemungkinan dampak dari Realisasi yang Rendah yaitu Kesehatan masyarakat : Potensi peningkatan risiko penyakit berbasis sanitasi (mis. diare, infeksi cacing), yang berdampak pada beban kesehatan dan produktivitas; Sosial-ekonomi : Biaya kesehatan rumah tangga meningkat, produktivitas menurun, potensi hambatan pada pencapaian target penurunan stunting.

Lingkungan : Risiko pencemaran sumber air tanah dan permukaan jika pengelolaan tinja tidak aman.

Rekomendasi peningkatan capaian untuk kedepannya dapat dengan pembentukan gugus tugas lintas Perangkat Daerah, membuat standarisasi sanitasi aman, verifikasi lapangan langsung, penambahan atau pelatihan enumerator hingga pemberian *reward and punishment* kinerja bagi kecamatan/desa.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) mengukur persentase jumlah timbulan sampah yang berhasil ditangani melalui fasilitas pengolahan resmi, baik berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), maupun fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan sampah dalam mengurangi beban sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menunjukkan komitmen daerah terhadap prinsip *circular economy* dan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2024 berdasarkan data dari sipsn kemenlh, Timbulan Sampah Harian (ton) Kabupaten purwakarta mencapai sebanyak 418,28 dan Timbulan Sampah Tahunan (ton) sebanyak 152,672.78. Dari total timbulan sampah tahunan tersebut hanya sebanyak 4,465.17 Penanganan sampah tahunan (Ton/tahun) atau sebesar 2,92.

Pada tahun berjalan, target indikator menunjukkan peningkatan dari baseline 3,21% menuju target 3,6%. Kenaikan ini diharapkan adanya perbaikan dalam sistem pengumpulan, pemilahan, serta pengolahan sampah di fasilitas resmi. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, persentase pengolahan sampah di daerah masih relatif rendah. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar menghadapi tantangan

signifikan dalam pengelolaan sampah, namun beberapa kota/kabupaten telah mencatat capaian di atas 5%.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup capaian Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) yaitu sebesar 4% dari target 3,60% atau sebesar 111,11%.

d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan layanan pengumpulan sampah secara rutin, teratur, dan menyeluruh kepada masyarakat. Dengan cakupan layanan yang semakin luas, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target nasional pengelolaan sampah.

Indikator ini berada di bawah pengampu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan armada, infrastruktur, serta sistem pengelolaan sampah yang efektif. Target yang ditetapkan adalah 79,71% pada tahun 2025, dengan baseline awal sebesar 76,26% pada tahun 2024. Capaian Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) adalah sebesar 64,85% atau sebesar 81,36% dari target yang ditetapkan.

e. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran komposit yang menggabungkan bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) suatu wilayah untuk menilai potensi risiko bencana pada level kabupaten/kota. Nilai IRB biasanya dinyatakan pada skala yang ditetapkan oleh BNPB/inaRISK dan

diperbarui berkala.

Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu sebesar 102,68 atau sebesar 87,65 dari target 90. Pada target dan realisasi capaian Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa meskipun capaian mendekati target, masih terdapat kelemahan dalam aspek kapasitas mitigasi. Hal ini bisa berupa keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem peringatan dini, atau kurangnya integrasi data risiko dalam perencanaan pembangunan.

f. Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)

Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendukung agenda nasional pengendalian perubahan iklim, berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan secara terintegrasi. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk saat ini data realisasi belum dapat disajikan karena indikator ini tidak terlaksana di tahun ini.

SASARAN 8 :

Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

a. Pertumbuhan produksi Listrik (%)

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan faktor penentu dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan produksi listrik menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pasokan energi yang memadai, berkelanjutan, dan merata.

Dalam laporan kinerja tahun berjalan, indikator Pertumbuhan Produksi Listrik (%) menjadi salah satu tolok ukur penting dalam

menilai keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor energi dan infrastruktur.

Pada tahun 2024, listrik yang diproduksi oleh PLN Kabupaten Purwakarta sebanyak 2.738.200.534 KWh. Sementara itu, listrik yang terjual sebanyak 2.671.218.159 KWh yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Jumlah pelanggan listrik tahun 2024 yaitu 367.765 pelanggan. Dilihat dari tahun ke tahun, jumlah

pelanggan listrik mengalami peningkatan.

Sedangkan Pada tahun 2025, listrik yang diproduksi oleh PLN Kabupaten Purwakarta sebanyak 2.651.924.508 KWh. Sementara itu, listrik yang terjual sebanyak 2.579.864.234 KWh yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Jumlah pelanggan listrik tahun 2025 yaitu 378.129 pelanggan. Dilihat dari tahun ke tahun, jumlah pelanggan listrik mengalami peningkatan.

Berdasarkan data 2024 dan data 2025 (Sumber data : BPS Purwakarta dalam Angka, 2026) terjadi penurunan produksi listrik sebesar -86.276.026 KWh sehingga capaian pertumbuhan produksi listrik sebesar -3,15%.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) proporsi penduduk suatu wilayah yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang diperlukan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, dinyatakan dalam persen.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian Realisasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan sebesar 4,07% lebih rendah dari target 4,21%, sehingga secara teknis target tercapai. Selisih absolut sebesar 0,14 poin persentase menunjukkan

perbaikan konsumsi energi penduduk dibanding target yang ditetapkan.

Penurunan *Prevalence of Undernourishment* menunjukkan arah yang positif, lebih sedikit penduduk yang mengalami konsumsi energi di bawah ambang kecukupan dibanding yang ditargetkan. Meskipun target tercapai, margin perbaikan relatif kecil. Hal ini menandakan bahwa kondisi masih rentan terhadap perubahan musiman atau ekonomi; pencapaian perlu dipertahankan dan diperkuat. Pencapaian ini dapat mengindikasikan efektivitas intervensi pangan/ekonomi yang telah dijalankan (mis. bantuan pangan, program ketahanan pangan keluarga, subsidi, atau program pemberdayaan ekonomi), namun perlu verifikasi lebih lanjut melalui indikator pendukung.

Faktor pendukung pencapaian diantaranya Distribusi bantuan pangan dan program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, Peningkatan akses pasar lokal dan stabilitas pasokan pangan dan Kampanye gizi dan edukasi konsumsi pangan yang menjangkau kelompok rentan. Sedangkan Faktor yang membatasi perbaikan lebih besar diantaranya Kerentanan musiman (panen, harga pangan musiman), Kelompok rumah tangga dengan pendapatan sangat rendah yang belum sepenuhnya terjangkau program dan Kualitas data survei dan cakupan sampling yang mungkin mempengaruhi estimasi.

Untuk rekomendasi selanjutnya dapat dengan mempertahankan dan memperkuat program-program yang dinilai efektif, kebijakan pencegahan jangka Panjang dan komunikasi publik.

c. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kapasitas Air Baku (m^3/detik) pada tingkat kabupaten adalah ukuran ketersediaan air mentah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, terutama oleh PDAM. Data ini biasanya dihitung dari debit sumber air (sungai, waduk, mata air) dan

dicatat dalam sistem seperti simSPAM atau laporan BPS. Angka ini dipengaruhi oleh kondisi hidrologi, infrastruktur PDAM, dan kualitas lingkungan. Kabupaten dengan kapasitas tinggi relatif aman, sementara daerah dengan kapasitas rendah perlu strategi tambahan seperti pembangunan waduk atau konservasi DAS.

Kapasitas air baku Kabupaten Purwakarta, sebagian besar dialokasikan dari Sungai Citarum melalui pengelolaan Perum Jasa Tirta II. Tantangan utamanya adalah pencemaran sungai, distribusi tidak merata, dan efisiensi PDAM. Untuk menjamin keberlanjutan, Purwakarta perlu memperkuat konservasi DAS, memperbaiki infrastruktur distribusi, dan meningkatkan kualitas pengolahan air. Untuk capaian tahun 2025 belum dapat tersedia.

d. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah nilai indeks komposit yang merefleksikan kondisi ketahanan pangan di wilayah (kabupaten/kota) berdasarkan beberapa aspek utama. Tujuannya yaitu untuk Memetakan kerentanan dan kekuatan sistem pangan lokal untuk membantu perencanaan kebijakan, prioritisasi intervensi, dan pemantauan. Indeks Ketahanan Pangan biasanya disusun dari beberapa aspek yang mewakili dimensi ketahanan pangan.

Realisasi kinerja Kabupaten Purwakarta tahun 2025 yaitu sebesar 74,44 atau capaian sebesar 91,92% dari target 80,98.

e. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Capaian Indikator Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mencapai 15,23% dengan realisasi 1,00 dari target 6,57. Dalam perspektif rencana pembangunan persentase capaian tersebut adalah sebesar 33,17%.

MISI III

MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI DAN STABILITAS KEAMANAN DAN EKONOMI YANG KONDUSIF, MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA, SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING.

SASARAN 9 :

Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Capaian Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mencapai 96,50% dengan realisasi 58,32 dari target 56,36. Dalam perspektif rencana pembangunan persentase capaian tersebut adalah sebesar 16,08%.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Capaian Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mencapai 106,03% dengan realisasi 1,23 dari target 1,16. Dalam perspektif rencana pembangunan persentase capaian tersebut adalah sebesar 17,67%.

c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Rasio kewirausahaan daerah di tingkat kabupaten adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang memilih jalur berwirausaha dibandingkan bekerja sebagai buruh atau mencari kerja. Indikator ini membantu pemerintah daerah memahami dinamika ekonomi lokal, potensi penciptaan lapangan kerja, serta arah kebijakan pengembangan UMKM. Rumus umum yang dipakai adalah jumlah pelaku usaha (sering didefinisikan sebagai usaha mikro atau usaha yang mempekerjakan buruh tetap) dibagi total

angkatan kerja, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. Rasio ini membantu pemerintah kabupaten menentukan apakah perlu mendorong lebih banyak program inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, atau akses permodalan, Menunjukkan seberapa kuat budaya berwirausaha di suatu daerah dan Menjadi tolok ukur keberhasilan program pemerintah seperti bantuan UMKM, koperasi, atau kredit usaha rakyat.

Capaian Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mencapai 94,29% dengan realisasi 2,81 dari target 2,98.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi.

Hasil capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 95,56%, bila dilihat dari target 6,9 – 7,51 dan realisasi sebesar 7,54. Terjadi peningkatan capaian sebesar 0,19% dan kenaikan realisasi sebesar 0,2% dibandingkan capaian dan realisasi pada tahun 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, pencari kerja sebanyak 17.178 orang dan penempatan tenaga kerja sebanyak 2.442 orang pada tahun 2025.

TPT di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 11,07% dan terus mengalami penurunan menjadi 7,34% di tahun 2024. Penurunan sebesar 3,73% ini

mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan peluang kerja di wilayah Kabupaten Purwakarta. TPT Kabupaten Purwakarta masih berada di atas Provinsi Jawa Barat sebesar 6,77% di tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitar Purwakarta, TPT Kabupaten Purwakarta lebih baik dibandingkan Kabupaten Karawang (7,99%) dan Kabupaten Bogor (7,69%), tetapi masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Subang (6,80%) dan Kabupaten Cianjur (6,17%).

Kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta dampak digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Faktor demografi juga berperan, karena jumlah angkatan kerja baru setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Meskipun berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan fasilitasi penempatan kerja belum berkontribusi banyak terhadap penurunan angka pengangguran.

TPT menunjukkan tren kenaikan, tantangan masih terlihat dari ketimpangan antar wilayah di sekitar Kabupaten Purwakarta. Penurunan lebih lanjut memerlukan strategi yang komprehensif, yaitu dengan Revitalisasi pendidikan vokasi agar sesuai kebutuhan industri, Peningkatan keterampilan digital untuk menghadapi transformasi teknologi, Penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif, teknologi, dan kewirausahaan, juga termasuk mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan memperluas peluang kerja di sektor informal maupun formal.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

TPAK perempuan di Purwakarta masih relatif rendah dibandingkan rata-rata Jawa Barat (50,59%). Dengan dominasi sektor industri yang lebih banyak menyerap laki-laki dan norma sosial yang membatasi peran perempuan di ranah publik, tantangan bagi perempuan Purwakarta untuk masuk ke pasar kerja formal cukup besar. Upaya peningkatan partisipasi perlu difokuskan pada pendidikan, pelatihan vokasi, serta kebijakan pro-perempuan yang mendorong kesetaraan akses kerja.

Faktor Penyebab Perbedaan diantaranya Dominasi industri di Purwakarta pada sektor manufaktur dan otomotif lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, Urbanisasi dan pola kerja Kabupaten/kota lain di Jawa Barat memiliki variasi sektor kerja (pertanian, perdagangan, jasa) yang lebih inklusif bagi perempuan dan Norma social menyebabkan Perempuan di Purwakarta masih banyak yang berperan di ranah domestik, sehingga partisipasi di pasar kerja formal lebih rendah.

f. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)

Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index - GEI) di tingkat kabupaten/kota merupakan alat ukur yang dikembangkan Bappenas untuk mengukur keberhasilan transformasi ekonomi yang ramah lingkungan. Indeks ini mencakup 15 indikator di tiga pilar: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Implementasinya bertujuan mendukung pembangunan rendah karbon, energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya.

Tujuannya ialah Mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang seimbang antara peningkatan kesejahteraan dan kelestarian alam.

g. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun (mis.

bangunan, jalan, mesin, peralatan). Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama dinyatakan dalam persen dan mencerminkan kontribusi investasi fisik terhadap perekonomian daerah.

h. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Memiliki definisi ukuran kontribusi perdagangan luar negeri (ekspor barang dan jasa) terhadap total nilai ekonomi wilayah (PDRB). Angka ini menunjukkan seberapa terbuka perekonomian daerah terhadap pasar internasional. Kabupaten dengan persentase tinggi biasanya memiliki sektor unggulan yang berorientasi ekspor (misalnya industri manufaktur, perkebunan, atau pariwisata).

Kabupaten Purwakarta tahun 2025 menunjukkan ekonomi berbasis industri pengolahan dengan kontribusi ekspor sebesar 22,08% dari PDRB. Posisi ini menempatkan Purwakarta sebagai salah satu motor ekspor Jawa Barat.

i. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi *(economic growth)* merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah sebesar 5,26%. Lajunya meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,64%.

j. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat

Koperasi merupakan komponen penting dalam tatanan perekonomian masyarakat. Bahkan bisa dikatakan sebagai soko

guru kekuatan ekonomi. Karenanya, koperasi yang ada di Purwakarta harus dalam kondisi aktif dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terus berupaya mendorong koperasi yang ada bisa terus aktif dan sehat.

Menurut data BPS Kabupaten Purwakarta, Koperasi aktif di Kabupaten Purwakarta berjumlah 631 koperasi pada tahun 2025. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 470 koperasi. Jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kecamatan Purwakarta dengan jumlah 187 koperasi, sedangkan koperasi paling sedikit terdapat di Kecamatan Sukasari dengan jumlah 7 koperasi.

Hasil realisasi indikator Persentase Koperasi Aktif dan sehat pada tahun 2025 sebesar 86,60% dari target sebesar 86,43%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi persentase koperasi aktif dan sehat sebesar 85,94% mengalami kenaikan. Dari perspektif target akhir RPJMD, indikator ini telah mencapai 16,70% dari target 90,87%.

k. Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM di Purwakarta tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah unit usaha kecil dan menengah, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan lokal. Data terbaru BPS Purwakarta menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

Pertumbuhan UMKM di Purwakarta tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah unit usaha kecil dan menengah, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan lokal. Data terbaru BPS Purwakarta menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

Sektor dominan UMKM di Kabupaten Purwakarta terdiri dari

kuliner tradisional seperti sate maranggi dan olahan ikan dari Waduk Jatiluhur, kerajinan tangan khas Purwakarta (batik, anyaman bambu, ukiran kayu), serta perdagangan hasil pertanian seperti padi, sayuran, dan buah lokal. UMKM menyerap sebagian besar angkatan kerja non-formal, terutama perempuan dan generasi muda, sehingga membantu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Peran digitalisasi juga terlihat dengan semakin banyak UMKM memanfaatkan platform online untuk pemasaran produk, terutama melalui marketplace dan media sosial. Hal ini membuka akses pasar yang lebih luas hingga ke tingkat nasional bahkan internasional.

UMKM di Purwakarta tahun 2025 tumbuh pesat dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Dukungan pemerintah daerah, infrastruktur strategis, serta digitalisasi menjadi faktor utama pendorong. Namun, tantangan seperti akses modal dan persaingan pasar tetap perlu diatasi agar UMKM semakin berdaya saing.

l. Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)

merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Secara konseptual, pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Terdapat dua pendekatan dalam mengukur pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar

pada

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta tahun 2025, yaitu sebesar 56,32%. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB yaitu sebesar 10,87 %.

m. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB

Purwakarta dikenal sebagai salah satu pusat industri di Jawa Barat, dengan kawasan industri besar seperti Bukit Indah dan Kota Industri Jababeka yang berdekatan. Sektor ini menghasilkan lebih dari separuh PDRB, terutama dari manufaktur tekstil, otomotif, dan makanan-minuman.

Menyumbang hampir 11% PDRB, sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencerminkan aktivitas distribusi barang hasil industri dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Perdagangan di Purwakarta juga didukung oleh posisi strategis di jalur Jakarta–Bandung.

n. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencatat kinerja positif dalam realisasi investasi sepanjang tahun 2025 dengan capaian yang melampaui target. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, total realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp12,47 triliun atau 111,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp11,20 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan terjaganya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Purwakarta. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi tercatat stabil pada setiap triwulan dengan dukungan kontribusi dari Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dari total realisasi investasi, PMDN mendominasi dengan nilai Rp9,58 triliun atau 76,80 persen, sementara PMA berkontribusi sebesar Rp2,89 triliun atau 23,20 persen. Kondisi ini mencerminkan peran strategis investasi, baik domestik maupun asing, dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2025, kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berhasil menyerap sebanyak 10.802 tenaga kerja Indonesia, yang terdiri atas 6.870 tenaga kerja dari PMA dan 3.932 tenaga kerja dari PMDN.

Capaian realisasi investasi tersebut turut menempatkan Kabupaten Purwakarta pada peringkat kelima sebagai kabupaten/kota yang paling diminati investor PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat sepanjang periode Januari hingga Desember 2025. Posisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Purwakarta, serta efektivitas kebijakan daerah dan pelayanan perizinan dalam mendukung realisasi investasi.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan. Ke depan, capaian investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

o. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Pada tahun 2025, sektor pariwisata Purwakarta yang tercermin dalam lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum diperkirakan menyumbang sekitar Rp726–730 miliar terhadap

PDRB harga berlaku. Angka ini tumbuh dari Rp636,99 miliar pada 2023 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 6,89%. Jika dibandingkan dengan total PDRB Purwakarta tahun 2025 sebesar Rp94,835 triliun.

Kontribusi ini tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh keberadaan destinasi wisata yang menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa destinasi utama yang menopang PDRB antara lain Taman Sri Baduga (ikon wisata budaya dengan pertunjukan air mancur terbesar di Asia Tenggara), Grama Tirta Jatiluhur (wisata air dan kuliner di sekitar waduk terbesar di Indonesia), Cikao Park (taman rekreasi keluarga dengan wahana edukasi) dan Taman Batu Cijanun (wisata alam berbasis mata air pegunungan). Destinasi ini menyumbang lebih dari 60% kontribusi pariwisata terhadap PDRB, menunjukkan konsentrasi ekonomi pada titik-titik wisata unggulan.

Meski kontribusi pariwisata terus tumbuh, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi diantaranya Ketergantungan pada destinasi unggulan artinya Konsentrasi wisata di beberapa lokasi membuat ekonomi rentan jika terjadi penurunan kunjungan, Daya dukung lingkungan atau Over-tourism berpotensi menekan kualitas lingkungan dan budaya local, Fluktuasi wisatawan atau Jumlah kunjungan sangat dipengaruhi oleh kondisi global, seperti pandemi atau krisis ekonomi, dan Keterlambatan data resmi Angka PDRB pariwisata biasanya baru final 1–2 tahun setelah periode berjalan, sehingga kebijakan berbasis data sering tertinggal.

p. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta tahun 2025 sangat signifikan,

terutama melalui pajak hotel, restoran, dan hiburan yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi destinasi wisata unggulan seperti Waduk Jatiluhur, Taman Sri Baduga, dan wisata kuliner khas Purwakarta.

Tantangannya adalah Fluktuasi kunjungan wisata akibat faktor eksternal (cuaca, ekonomi global), serta keterbatasan kapasitas destinasi. Akan tetapi dapat di lakukan strategi Diversifikasi destinasi wisata baru, peningkatan kualitas layanan, dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk investasi fasilitas wisata.

q. Tingkat Inflasi (%)

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya invetasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi

yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi.

Pada Desember 2025, gabungan 10 kota di Jawa Barat terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,15. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 3,14 persen dan terendah terjadi

di Kabupaten Subang sebesar 2,11 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,74 persen;

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah sebesar 1,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin

rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,95 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,19 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,79 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,91 persen. Secara year on year (y-o-y) 2025 mengalami inflasi sebesar 2,63 persen. Inflasi y-o-y tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 3,14 persen. Sementara inflasi y-o-y terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 2,11 persen.

SASARAN 10 :

Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah

a. Persentase penanganan trantibumlinmas (%)

Indikator ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis aparat, tetapi juga efektivitas koordinasi lintas sektor (Satpol PP, BPBD, Damkar, dan aparat keamanan lain). Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian indikator ini mencapai 100%, sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Persentase tinggi menunjukkan proporsi gangguan yang berhasil ditangani, tetapi tidak otomatis mencerminkan kualitas penanganan. Faktor seperti kecepatan respons, hasil akhir (misalnya korban selamat), dan kepuasan masyarakat juga harus diperhatikan.

b. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(Trantibum) yang dapat diselesaikan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas Perangkat Daerah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian indikator ini mencapai 100%, sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan Trantibum yang terjadi di wilayah kerja dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MISI IV

MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERINTEGRITAS SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERBASIS DIGITAL

SASARAN 11 :

Terwujudnya transformasi tata Kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

a. Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan peningkatan integrasi aplikasi, tata kelola data, dan penguatan infrastruktur digital. Perbandingan target dan realisasi mengindikasikan bahwa transformasi digital pemerintahan berjalan secara bertahap namun terarah.

Capaian Indeks SPBE pada tahun 2025 sebesar 99,24 dengan realisasi sebesar 3,94 dari target 3,97. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 16,54%.

b. Indeks Inovasi Daerah

Kabupaten Purwakarta tahun 2025 memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 49,60 poin atau predikat “Inovatif” dengan inovasi yang dikirim sebanyak 40 inovasi dari 27 Perangkat Daerah. Hasil tersebut mengalami peningkatan baik secara kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 48,92 atau predikat “Inovatif” dengan inovasi yang dilaporkan sebanyak 36 inovasi dari 26 Perangkat Daerah.

Indikator Indeks Inovasi Daerah terdapat perbedaan capaian yang pada tahun sebelumnya 96,64 % (tidak mencapai target) sementara pada tahun ini 100,40 % (melampaui target). Secara persentase indikator Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan sebesar 1,39 % yang semula 48,92 poin menjadi 49,60 poin.

c. Nilai SAKIP Kabupaten

merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Komponen yang dinilai meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Indikator ini diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil realisasi indicator Nilai Sakip Kabupaten Purwakarta tahun 2025 Predikat B (66,08). Indikator ini mengalami penurunan realisasi sebesar 0,26 poin.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat

merupakan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari unit penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan.

Kabupaten Purwakarta telah memiliki suatu aplikasi untuk

pengukuran IKM. Dan setiap Perangkat Daerah melakukan surveynya melalui aplikasi ini, sehingga dapat dilihat secara real time. Walaupun begitu meskipun naik 1,072 poin tetapi masih perlu ditingkatkan lagi baik penyusunan pelaporan dan keikutsertaan pengguna layanan pada beberapa PD tertentu.

Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta. Melakukan penyesuaian jenis layanan apabila terdapat perubahan. Melakukan Sosialisasi SKM Online dari Kemenpan RB

e. Indeks Pelayanan Publik

Kabupaten Purwakarta berhasil meraih kategori A (Sangat Baik) dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 dengan skor 4,51. Capaian ini menempatkan Purwakarta sejajar dengan daerah terbaik di Indonesia dalam hal kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di tingkat kabupaten dapat menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.

Hal ini juga menunjukkan tata kelola pelayanan publik di Purwakarta sudah berada di level prima, dengan standar tinggi dalam hal aksesibilitas, transparansi, kecepatan, dan kepastian layanan.

Capaian kategori A ini tidak tercapai secara instan, melainkan merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melakukan pembenahan tata kelola pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan standar pelayanan, pengembangan inovasi layanan, hingga penguatan budaya melayani di seluruh perangkat daerah.

f. Indeks Reformasi Birokrasi

Kabupaten Purwakarta berhasil Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional. Hal ini terlihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 sebesar 101,20% dengan realisasi sebesar 86,26 poin dari target 85,23.

Keberhasilan pencapaian indeks reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diakselerasi oleh beberapa faktor diantaranya kolaborasi dari seluruh Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Purwakarta, Pendampingan langsung dengan Provinsi termasuk menerapkan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta melalui aplikasi SURABI Provinsi Jawa Barat. Hal ini diharapkan agar peningkatan tata kelola merata di tiap Perangkat Daerah.

g. Sistem Merit Kabupaten

Capaian Sistem Merit Kabupaten pada tahun 2025 sebesar 286,00 dengan realisasi sebesar 100,60 dari target 284,30. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 16,77%.

h. Nilai LPPD Kabupaten

merupakan nilai hasil capaian atas kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak. Indikator ini diukur oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil Nilai LPPD Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2025 belum ada.

i. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun

Anggaran 2025 saat ini masih dalam proses audit. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

j. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dihitung dengan membandingkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah mengelompokkan daerah berdasarkan nilai rasio ini untuk tujuan alokasi hibah, pembiayaan, subsidi bunga, dan dukungan pendanaan pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 memuat peta provinsi dan peta kabupaten/kota beserta lampiran yang memuat rasio per kabupaten/kota.

Dengan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan berkelanjutan, Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal, mendukung pembangunan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah juga akan menggali sumber pendapatan alternatif melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.

k. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 sebesar 86,96% dengan realisasi sebesar 70,2175 dari target 80,746. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 14,49%.

l. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk

memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan.

Capaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2025 sebesar 104,159%. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 17,36%.

m. Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)

MRI Kabupaten adalah ukuran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah. MRI biasanya diukur oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai bagian dari evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Capaian Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada tahun 2025 sebesar 94,35%. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 15,73%.

n. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio pajak daerah terhadap PDRB di tingkat kabupaten adalah ukuran seberapa besar kontribusi penerimaan pajak kabupaten terhadap ekonomi kabupaten tersebut; nilainya berbeda antar kabupaten dan harus dihitung dari data APBD (pajak daerah) dan PDRB kabupaten yang resmi.

Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 66,30%. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 11%.

o. Efektifitas Kerjasama Internasional (%)

Kerja sama internasional di tingkat kabupaten terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing daerah, memperluas investasi, dan memperkuat pelayanan publik, namun tetap harus berada

dalam pengawasan pemerintah pusat agar selaras dengan politik luar negeri Indonesia. Model yang paling banyak digunakan adalah program sister city atau sister province yang membuka akses pasar, teknologi, dan jejaring global.

Efektivitas kerja sama internasional di kabupaten sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta kemampuan daerah memanfaatkan peluang global. Kabupaten seperti Purwakarta bisa memperoleh manfaat besar dari program sister city dengan kota maju, terutama dalam bidang ekonomi kreatif, pendidikan, dan teknologi.

Pada Kabupaten Purwakarta belum dilaksanakan efektivitas kerja sama internasional sehingga belum ada capaian yang dapat ditampilkan.

p. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI sejak 2022 sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional.

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2025 sebesar 129,44%. Dalam konteks perencanaan daerah, pencapaian indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati dari target akhir RPJMD yaitu 21,57%.

q. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indeks kepatuhan adalah instrumen pengawasan Ombudsman RI untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mematuhi standar pelayanan publik sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009. Metode penilaian dilakukan melalui observasi lapangan, analisis dokumen, wawancara dengan petugas, serta survei persepsi

masyarakat. Kualitas pelayanan publik adalah wajah nyata pemerintah di mata masyarakat. Indeks ini menunjukkan apakah warga diperlakukan dengan adil, cepat, dan transparan.
Zona Hijau (tinggi) menandakan kepatuhan baik, Zona Kuning (sedang) menunjukkan masih ada kekurangan, sementara Zona Merah (rendah) mengindikasikan potensi maladministrasi serius.

Indeks ini menjadi tolok ukur transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintah daerah, sekaligus alat kontrol sosial bagi masyarakat.
Indeks kepatuhan bukan sekadar angka: ia mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat. Kabupaten dengan nilai rendah harus segera melakukan perbaikan agar tidak menimbulkan maladministrasi seperti pungli, diskriminasi, atau keterlambatan layanan.
Pemkab Purwakarta membentuk Tim Akselerasi Pelayanan Publik untuk memperbaiki standar layanan secara sistematis. Meskipun begitu Capaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik tidak mencapai target karena ada perubahan indikator penilaian pada tahun 2025. Serta perubahan dari Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik menjadi Opini Mal Administrasi. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya menekankan pada kepatuhan penerapan standar pelayanan dan pengetahuan mengenai ombudsman, sedangkan pada tahun sekarang lebih diperluas mulai dari perencanaan dan penilaian mal administrasi, Meski masih berada di Zona Hijau namun nilai yang diraih mencerminkan ada beberapa indikator yang harus menjadi perhatian ke depan untuk dilakukan perbaikan.
Solusi yang dilakukan yaitu dengan Meningkatkan koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat untuk terus melakukan pendampingan khususnya di Kabupaten Purwakarta, Meningkatkan koordinasi dengan Tim Akselerasi Peningkatan

Pelayanan Publik Di Kabupaten Purwakarta dengan pemenuhan rencana aksi yang telah dibuat, melakukan pembinaan tidak hanya pada lokus penilaian tetapi juga pada Perangkat Daerah lainnya, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat terhadap pengawasan di lapangan,

Hasil capaian indikator sasaran pada tiap misi dapat dilihat pada table 3.2 di bawah ini :

TABEL 3.2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.							
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,07	75,28	100,28	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indek Pembangunan Manusia	74,06	74,97	101,23	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Tingkat Kemiskinan (%)	7,55 - 8,33	7,87	100,89	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,80	85,00	99,07	Sangat Tinggi	Bakesbangpol
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,54	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	101,48	Sangat Tinggi	BPS (Jabar Berita Resmi Statistik, 2026)
1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,07	75,28	100,28	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Jumlah Kasus Kematian Ibu	30,00	12	250,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		per Tahun (kasus)					
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	13,16	14,5 *SSGI 2024	110,18	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	92,78	101,96	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	94,17	103,48	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,13	101,00	102,93	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,99	1,31	75,57	Sedang	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Pembangunan Keluarga	61,90	62,70	101,29	Sangat Tinggi	DPPKB
1.2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,15	8,37	102,70	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,27	12,51	101,96	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas	5,56	5,50	98,92	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)					
		Indeks Pembangunan Manusia	74,06	74,97	101,23	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71,48	1,82	2,55	Sangat Rendah	Disarpus
1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	7,55 - 8,33	7,87	100,89	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	5,50	0,20	3,64	Sangat Rendah	Disnakertrans
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	0,365 - 0,372	0,369	99,86	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	13.221,39	13.400,00	101,35	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,22	57,22	100,00	Sangat Tinggi	Disporaparbud
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,80	85,00	99,07	Sangat Tinggi	Bakesbangpol
1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,54	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	101,48	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Pembangunan	88,08	88,57	100,45	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	dalam pembangunan	Gender (IPG)					dalam Angka, 2026)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,35	N/A	N/A	N/A	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Desa	482,15	509,78	105,73	Sangat Tinggi	DPMD
		Persentase Desa Mandiri (%)	42,08	52,46	124,67	Sangat Tinggi	DPMD
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,26	66,25	98,50	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Profesionalitas ASN	79,94	84,90	106,20	Sangat Tinggi	BKPSDM
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.							
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	85,18	81,60	95,80	Sangat Tinggi	DPUTR
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	64,23	69,99	108,97	Sangat Tinggi	DLH
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	85,18	81,60	95,80	Sangat Tinggi	DPUTR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	81,13	69,56	85,74	Tinggi	DPUTR
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	91,88	79,85	86,91	Tinggi	Disperkim
		Persentase Rumah Tangga	83,81	83,01	99,05	Sangat Tinggi	Disperkim

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		dengan Akses Sanitasi Layak					
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,03	27,78	92,51	Sangat Tinggi	Disperkim
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	60,94	59,20	97,14	Sangat Tinggi	Disperkim
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	64,23	69,99	108,97	Sangat Tinggi	DLH
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,08	4,11	58,05	Rendah	Disperkim
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	3,60	4,00	111,11	Sangat Tinggi	DLH
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	79,71	64,85	81,36	Tinggi	DLH
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	90,00	102,68	87,65	Tinggi	BPBD
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	279.711,36	N/A	N/A	N/A	DLH

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
3	Memperkuat ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,21	4,07	103,44	Sangat Tinggi	Dispangtan
3.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)	9,60	-3,15	-32.82	Sangat Rendah	DPUTR
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,21	4,07	103,44	Sangat Tinggi	Dispangtan
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3,18	N/A	N/A	N/A	DPUTR
		Indeks Ketahanan Pangan	80,98	74,44	91,92	Sangat Tinggi	Dispangtan
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	6,57	1,00	15,23	Sangat Rendah	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.							
4	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,9 - 7,51	7,54	95,56	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Pertumbuhan Ekonomi	4,78 - 5,19	5,26	105,52	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Tingkat Inflasi (%)	0,91	2,11	42,94	Sangat Rendah	BPS (Jabar dalam Angka, 2026)
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8,46	9,20	108,75	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		(Trilyun)					Angka, 2026)
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	84,92 - 85,28	89,22	104,84	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SatpolPP
4.1	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	58,36	56,32	96,50	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)"	1,16	1,23	106,03	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,98	2,81	94,29	Sangat Tinggi	DKUPP
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,9 - 7,51	7,54	95,56	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,50	46,60	100,22	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)	71,32	N/A	N/A	N/A	BAPPERIDA
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,32	23,04	98,81	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19,85	22,08	111,23	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Pertumbuhan Ekonomi	4,78 – 5,19	5,26	105,52	Sangat Tinggi	DKUPP

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	86,43	86,60	100,20	Sangat Tinggi	DKUPP
		Pertumbuhan UMKM	1,55	13,16	846,70	Sangat Tinggi	DKUPP
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	84,92 - 85,28	89,22	104,84	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	69,24	67,19	97,04	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	8,46	9,20	108,75	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,20	1,23	102,39	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,52	10,52	100,00	Sangat Tinggi	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
		Tingkat Inflasi (%)	0,91	2,11	42,94	Sangat Rendah	BPS (Purwakarta dalam Angka, 2026)
4.2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SatpolPP
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SatpolPP
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.							

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
5	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	85,23	86,26	101,20	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	4,62	4,51	97,61	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,97	3,94	99,24	Sangat Tinggi	Diskominfo
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	BKAD
5.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,97	3,94	99,24	Sangat Tinggi	Diskominfo
		Indeks Inovasi Daerah	49,40	49,60	100,40	Sangat Tinggi	Bapperida
		Nilai SAKIP Kabupaten	66,67	66,08	99,12	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,39	92,11	101,90	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	4,62	4,51	97,61	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	85,23	86,26	101,20	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Sistem Merit Kabupaten	284,30	286,00	100,60	Sangat Tinggi	BKPSDM
		Nilai LPPD Kabupaten	3,4147				Sekretariat Daerah
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	BKAD
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,274	1,261	98,95	Sangat Tinggi	Bapenda
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,746	70,2175	86,96	Tinggi	BKAD
		Maturitas Sistem	3,108	3,237	104,159	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,209	3,028	94,357	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,77	0,510	66,30	Sedang	Bapenda
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)	100,00	N/A*	N/A*	N/A*	Sekretariat Daerah
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	44,65	57,790	129,44	Sangat Tinggi	Diskominfo
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	94,72	84,14	88,83	Tinggi	Sekretariat Daerah

TABEL 3.3

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.														
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,68	71,47	101,12	70,75	74,67	105,54	72,01	74,92	104,04	75,07	75,28	100,28
		Indek Pembangunan Manusia	69,92	71,56	102,35	70,35	73,43	104,38	72,99	73,99	101,37	74,06	74,97	101,23
		Tingkat Kemiskinan (%)	7,63	8,83	115,73	7,48	8,46	113,10	7,25	8,41	86,21	7,55 - 8,33	7,87	100,89
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72	74,45	103,40	73	64,73	88,67	77,95	76,47	98,10	85,80	85,00	99,07
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0,54	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	101,48
1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,68	71,47	101,12	70,75	74,67	105,54	72,01	74,92	104,04	75,07	75,28	100,28
		Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	21	N/A*	30,00	12	250,00

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		(kasus)												
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	14,50	N/A*	13,16	2,87	458,54
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	91,00	N/A*	91	92,78	101,96
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	80,85	N/A*	91	94,17	103,48
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	98,10	N/A*	98,13	101,00	102,93
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,5	1,69	338	0,47	1,41	300	1,50	1,38	92,00	0,99	1,31	75,57
		Indeks Pembangunan Keluarga	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	61,63	N/A*	61,90	62,70	101,29
1.2	Terwujudnya pendidikan	Rata-Rata lama sekolah	8,04	8,11	100,87	8,12	8,13	100,12	9,23	8,14	88,19	8,15	8,37	102,70

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
	berkualitas yang merata	penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)												
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,58	12,13	96,42	12,37	12,18	95,68	13,85	12,25	88,45	12,27	12,51	101,96
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	5,49	N/A*	5,56	5,50	98,92
		Indeks Pembangunan Manusia	69,92	71,56	102,35	70,35	73,43	104,38	72,99	73,99	101,37	74,06	74,97	101,23
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	70,98	N/A*	71,48	1,82	2,55
1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	7,63	8,83	115,73	7,48	8,46	113,10	7,25	8,41	86,21	7,55 - 8,33	7,87	100,89
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	4,00	N/A*	5,50	N/A**	N/A**
		Indeks Gini/ Ketimpangan	0,36	0,38	105,56	0,36	0,38	105,56	0,306	0,398	76,884	0,365 -	0,369	99,86

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		Pendapatan										0,372		
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	N/A*	N/A*	N/A*	13,1505	N/A*	N/A*	12,64	13,10	103,66	13.221,39	13.400,00	101,35
1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	56,65	N/A*	57,22	57,22	100,00
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72	74,45	103,40	73	64,73	88,67	77,95	76,47	98,10	85,80	85,00	99,07
1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0,55	N/A*	0,54	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	101,48
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,71	86,93	96,90	90,18	86,94	96,41	87,38	87,27	99,87	88,08	88,57	100,45
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,47	77,89	101,86	77,46	77,8	100,44	79,92	78,58	98,32	79,35	N/A**	N/A**
		Indeks Desa	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	482,15	509,78	105,73
		Persentase Desa Mandiri (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	36,61	N/A*	42,08	52,46	124,67
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	47,75	65,21	136,57	48,14	66,37	138,87	82,22	66,62	81,03	67,26	66,25	98,50

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		(TPAK)												
		Indeks Profesionalitas ASN	Renda h (61-70)	Tinggi (87,77)	125,39	Renda h (61-70)	Sangat Rendah (55,68)	79,54	Sangat Rendah	Tinggi	150,00	79,94	84,90	106,23
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.														
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88,63	84,93	95,83	89,63	81,49	90,92	85,00	79,57	93,61	85,18	81,60	95,80
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	72,31	64,28	88,90	72,81	58,41	80,22	67,49	61,15	90,61	64,23	69,99	108,97
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88,63	84,93	95,83	89,63	81,49	90,92	85,00	79,57	93,61	85,18	81,60	95,80
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	100,00	76,31	76,31	81,13	69,56	85,74
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	91,02	N/A*	91,88	79,85	86,91
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	83,01	N/A*	83,81	83,01	99,05

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	27,78	N/A*	30,03	27,78	92,51
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	59,20	N/A*	60,94	59,20	97,14
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	72,31	64,28	88,90	72,81	58,41	80,22	67,49	61,15	90,61	64,23	69,99	108,97
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	4,11	N/A*	7,08	4,11	58,05
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	3,21	N/A*	3,60	4,00	111,11
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	76,26	N/A*	79,71	64,85	81,36

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	Sedang	N/A*	Sedang	Sedang	100,00	90,00	102,68	87,65
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	253.711,36	N/A*	279.711,36	N/A**	N/A**
Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.														
3	Memperkuat ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	4,64	N/A*	4,21	4,07	103,44
3.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	-38,25	N/A*	9,60	-3,15	-32.82
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	4,64	N/A*	4,21	4,07	103,44
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2,84	N/A*	3,18	N/A**	N/A**
		Indeks	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	80,19	N/A*	80,98	74,44	91,92

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		Ketahanan Pangan												
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	6,39	6,50	101,72	6,57	1,00	15,23
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.														
4	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,08	8,75	86,81	9,91	7,72	128,37	7,00	7,36	95,37	6,9 - 7,51	7,54	95,56
		Pertumbuhan Ekonomi	3,66	5,24	143,17	4,16	4,97	119,47	5,80	4,64	80,00	4,78 - 5,19	5,26	105,52
		Tingkat Inflasi (%)	2,96	6,04	204,05	2,89	3,22	111,42	1,34	0.93	144,09	0,91	2,11	42,94
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	70	82,83	118,33	75	97,72	130,29	93,32	81,30	87,12	8,46	9,20	108,75
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	82,77	84,02	101,51	84,92 - 85,28	89,22	104,84
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	100,00	N/A*	100,00	100,00	100,00
4.1	Meningkatnya pertumbuhan dan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	57,60	N/A*	58,36	56,32	96,50

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
	produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)"	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	1,15	N/A*	1,16	1,23	106,03
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2,85	N/A*	2,98	2,81	94,29
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,08	8,75	86,81	9,91	7,72	77,90	7,00	7,36	95,37	6,9 - 7,51	7,54	95,56
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	46,60	N/A*	46,50	46,60	100,22
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	69,57	N/A*	71,32	N/A**	N/A**
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	23,34	N/A*	23,32	23,04	98,81
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	20,02	N/A*	19,85	22,08	111,23
		Pertumbuhan Ekonomi	3,66	5,24	143,17	4,16	4,97	119,47	5.80	4,64	80,00	4,78 – 5,19	5,26	105,52
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	89,70	85,94	95,81	86,43	86,60	100,20
		Pertumbuhan	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	11,86	11,86	100,00	1,55	13,16	846,70

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		UMKM												
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	82,77	84,02	101,51	84,92 - 85,28	89,22	104,84
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	4,92	6,78	137,80	5	10,94	218,8	56,08	60,50	107,88	69,24	67,19	97,04
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	70	82,83	118,33	75	97,72	130,29	93,32	81,30	87,12	8,46	9,20	108,75
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	68,55	N/A*	1,20	1,23	102,39
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	50	6,36	12,72	55	100,66	183,02	9,23	9,23	100,00	10,52	10,52	100,00
		Tingkat Inflasi (%)	2,96	6,04	204,05	2,89	3,22	111,42	1,34	0.93	144,09	0,91	2,11	42,94
4.2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan	Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	100,00	N/A*	100,00	100,00	100,00
		Persentase Gangguan Trantibum yang	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	100,00	N/A*	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
	stabilitas ekonomi daerah	dapat diselesaikan												
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.														
5	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	55	62,42	113,49	60	74,1	123,5	67,41	84,95	126,02	85,23	86,26	101,20
		Indeks Pelayanan Publik	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	4,58	N/A*	4,62	4,51	97,61
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2,60	3,94	151,54	3,97	3,94	99,24
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
5.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2,60	3,94	151,54	3,97	3,94	99,24
		Indeks Inovasi Daerah	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	50,62	48,92	96,64	49,40	49,60	100,40
		Nilai SAKIP Kabupaten	BB (70)	B (66,19)	94,56	A	B (66,57)	83,32	69,64	66,34	95,26	66,67	66,08	99,12
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	100	B	B	100	Baik	Sangat Baik	150,00	90,39	85,00	94,04
		Indeks Pelayanan Publik	N/A*	4,08	N/A*	N/A*	3,54	N/A*	N/A*	4,58	N/A*	4,62	4,51	97,61
		Indeks	55	62,42	113,49	60	74,1	123,5	67,41	84,95	126,02	85,23	86,26	101,20

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		Reformasi Birokrasi												
		Sistem Merit Kabupaten	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	Baik	Baik	100,00	284,30	286,00	100,60
		Nilai LPPD Kabupaten	3,5	3,2*	91,43	3,5	3,09*	88,29	3,50	3,5	100,00	3,4147	N/A**	N/A**
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0,228	0,229	100,439	1,274	1,261	98,95
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	82,45	79,96	96,98	80,746	70,2175	86,96
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	3.000	3.000	100,00	3,108	3,237	104,159
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	3,194	N/A*	3,209	3,028	94,357
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0,425	N/A*	0,77	0,510	66,30
		Efektifitas	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	n/a	N/A*	100,00	N/A**	N/A**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
		Kerjasama Internasional (%)												
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	44,200	N/A*	44,65	57,790	129,44
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	94,36	N/A*	94,72	84,14	88,83

* Data tidak tersedia / tidak menjadi indikator kinerja pada tahun N

** Data belum tersedia / belum rilis

TABEL 3.4

KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,28	76,09	16,71
		Indek Pembangunan Manusia	74,97	75,48	16,87
		Tingkat Kemiskinan (%)	7,87	3,25 - 4,46	16,81
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,00	90,06	16,51
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	0,52	N/A
1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,28	76,09	16,71
		Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (kasus)	12	18,00	41,67
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	14,5 *SSGI 2024	8,46	76,42
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	92,78	91,00	16,99
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94,17	91,00	17,25
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	101,00	98,32	17,15
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,31	1,11	12,60
		Indeks Pembangunan Keluarga	62,70	63,40	16,88
1.2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,37	8,20	17,12

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,51	12,50	16,99
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	5,50	5,86	16,49
		Indeks Pembangunan Manusia	74,97	75,48	16,87
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1,82	76,98	0,42
1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	7,87	3,25 - 4,46	16,81
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,20	8,90	N/A
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	0,369	0,376 - 0,382	16,64
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	13.400,00	13.875,76	16,89
1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,22	60,09	16,67
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,00	90,06	16,51
1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	0,52	N/A
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,57	92,36	N/A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	83,31	N/A
		Indeks Desa	509,78	488,74	17,62
		Persentase Desa Mandiri (%)	52,46	46,57	20,78
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,25	70,62	16,42
		Indeks Profesionalitas ASN	84,92	82,10	17,70
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang	Tingkat Kemantapan Jalan	81,60	99,65	15,97

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
	ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	kabupaten/kota			
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	69,99	65,49	18,16
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,60	99,65	15,97
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	69,56	85,21	14,29
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	79,85	96,45	14,48
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	83,01	87,96	16,51
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	27,78	47,52	15,42
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	59,20	68,59	16,19
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	69,99	65,49	18,16
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,11	33,96	9,68
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,00	13,97	N/A
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	64,85	100,00	N/A
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	102,68	85,01	14,61
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	N/A	492.891,50	N/A
3	Memperkuat ketahanan energi air	Prevalensi Ketidakcukupan	4,07	3,10	17,24

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
	dan pangan yang berkelanjutan	Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)			
3.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)	-3,15	10,05	-5,47
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,07	3,10	17,24
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	4,93	N/A
		Indeks Ketahanan Pangan	74,44	85,04	15,32
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	1,00	6,90	2,54
4	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,54	6,52 - 7,14	15,93
		Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,35 - 8,05	17,59
		Tingkat Inflasi (%)	2,11	0,83	7,16
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	9,20	10,30	18,13
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	89,22	121,22 - 127,43	17,47
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	100,00	16,67
4.1	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	56,32	58,47	16,08
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)"	1,23	1,20	17,67
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,81	3,78	N/A

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,54	6,52 - 7,14	15,93
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,60	47,20	16,70
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)	N/A	76,97	N/A
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,04	23,35	16,47
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22,08	19,20	0,02
		Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,35 - 8,05	17,59
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	86,60	90,87	16,70
		Pertumbuhan UMKM	13,16	1,59	141,12
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	89,22	121,22 - 127,43	17,47
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	67,19	72,72	16,17
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	9,20	10,30	18,13
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,23	1,26	17,06
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,52	11,06	16,66
		Tingkat Inflasi (%)	2,11	0,83	7,16
4.2	Meningkatnya soliditas	Persentase	100,00	100,00	16,67

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
	penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	penanganan trantibumlinmas (%)			
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	16,67
5	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	86,26	87,16	16,87
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,84	16,27
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,94	4,15	16,54
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	16,67
5.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,94	4,15	16,54
		Indeks Inovasi Daerah	49,60	51,87	16,73
		Nilai SAKIP Kabupaten	66,08	68,33	16,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,11	92,61	15,67
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,84	16,27
		Indeks Reformasi Birokrasi	86,26	87,16	16,87
		Sistem Merit Kabupaten	286,00	285,00	16,77
		Nilai LPPD Kabupaten	N/A	3,54	N/A
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	16,67
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,261	1,34	16,5
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,2175	84,7764	14,49
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,237	3,27	17,36

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
		Pemerintah (SPIP)			
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,028	3,287	15,73
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,510	0,802	11,00
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)	N/A	100,00	N/A
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	57,790	46,889	21,57
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	84,14	96,90	14,02

TABEL 3.5

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN CAPAIAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,28	75,53	99,66
		Indeks Pembangunan Manusia	74,97	75,90	98,77
		Tingkat Kemiskinan (%)	7,87	7,02	112,11
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,00	79,43	107,01
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	0,458* Data rilis BPS Mei 2025	119,65
1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,28	75,53	99,67
		Jumlah Kasus	12	799	1,5

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
		Kematian Ibu per Tahun (kasus)			
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	14,5 *SSGI 2024	15,9 *SSGI 2024	91,19
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	92,78	96	96,65
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94,17	80	117,71
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	101,00	98,6	102,43
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,31	1,02	128,43
		Indeks Pembangunan Keluarga	62,70	75,90	82,61
1.2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,37	9,14	91,58
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,51	13,02	96,08
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	5,50	N/A	N/A
		Indeks Pembangunan Manusia	74,97	75,90	98,77
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1,82	18,07	N/A

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	7,87	7,02	112,11
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,20	N/A	N/A
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	0,369	0,397	92,94
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	13.400,00	12.157,00	110,22
1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,22	55,50	103.09
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,00	79,43	107,01
1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	0,458* Data rilis BPS Mei 2025	119,65
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,57	91,26	97.05
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	68,92	N/A
		Indeks Desa	509,78	N/A	N/A
		Persentase Desa Mandiri (%)	52,46	24	218,58
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,25	66,99	98,90
		Indeks Profesionalitas ASN	84,90	92,8	91,5
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,60	83,48	97,74
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	69,99	66,09	105,9
2.1	Meningkatnya	Tingkat	81,60	83,48	97,74

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
	pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Kemantapan Jalan kabupaten/kota			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	69,56	N/A	N/A
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	79,85	93,9	85,01
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	83,01	76,20	108,93
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	27,78	4,9	N/A
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	59,20	68,4	86,55
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	69,99	66,09	105,9
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,11	10,5	39,14
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,00	15	26,7
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	64,85	N/A	N/A
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	102,68	151,38	67,83
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	N/A	N/A	N/A
3	Memperkuat	Prevalensi	4,07	5,99	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
	ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan	Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		(BPS tahun 2024)	
3.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)	-3,15	4,1	-76.82
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,07	5,99 (BPS tahun 2024)	
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	N/A	N/A
		Indeks Ketahanan Pangan	74,44	82,97	89,7
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	1,00	8,57	11,67
4	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,54	6,77	111,37
		Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,32	98,87
		Tingkat Inflasi (%)	2,11	2,63	80,22
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	9,20	296,8	3,09
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	89,22	59,86	149,04
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	N/A	N/A
4.1	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	56,32	40,9	137,7
		Rasio PDRB Penyediaan	1,23	2,2	55,91

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
		Akomodasi Makan dan Minum(%)"			
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,81	3,2	87,8
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,54	6,77	111,37
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,60	49,27	94,58
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)	N/A	N/A	N/A
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,04	32,5	70,89
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22,08	N/A	N/A
		Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,32	98,87
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	86,60	50,27	172,3
		Pertumbuhan UMKM	13,16	N/A	N/A
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	89,22	59,86	149,04
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	67,19	55,3	121,5
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan	9,20	296,8	3,09

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
		PMDN (Trilyun)			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,23	2,2	55,9
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,52	7,6	138,4
		Tingkat Inflasi (%)	2,11	2,63	80,22
4.2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00		
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00		
5	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	86,26	99,05	87,09
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,32	104,4
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,94	4,73	83,3
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100
5.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,94	4,73	83,3
		Indeks Inovasi Daerah	49,60	66,8	74,25
		Nilai SAKIP Kabupaten	66,08	82,76	79,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,11	88,3	104.31

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Jawa Barat 2025	% Capaian
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,32	104,4
		Indeks Reformasi Birokrasi	86,26	99,05	87,09
		Sistem Merit Kabupaten	286,00	355,8	80,4
		Nilai LPPD Kabupaten	N/A	3,614	N/A
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,261	1,42	88,8
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,2175	82,1	85,5
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,237	3,78	85,63
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,028	3,65	82,96
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,510	2,9	17,6
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)	N/A	85,6	N/A
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	57,790	55,8	103,9
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	84,14	93,4	90,1

TABEL 3.6

ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.							
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,07	75,28	100,28		
		Indek Pembangunan Manusia	74,06	74,97	101,23		
		Tingkat Kemiskinan (%)	7,55 - 8,33	7,87	100,89		
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,80	85,00	99,07		
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	75,07	75,28	100,28		
1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,07	75,28	100,28		
		Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (kasus)	30,00	12	250,00		
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	13,16	14,5 *SSGI 2024	110,18	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dilakukan secara mandiri di tingkat daerah, karena SSGI merupakan kewenangan Pemerintah Pusat	Koordinasi atas pencapaian target dilapangan, meliputi: • Koordinasi Lintas Sektor • Kolaborasi Tim Lapangan (kader Kesehatan, petugas Puskesmas, dan Pemerintah Daerah)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							• Pemberdayaan Masyarakat
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	92,78	101,96		
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	94,17	103,48		
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,13	101,00	102,93	Telah mencapai target disebabkan upaya perbaikan telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja	Penambahan anggaran, untuk menambah kuota kepesertan agar dapat mencapai Presentase UHC 98% dan Keaktifan Kepesertaan 80% pada akhir Desember 2025 sebagai salah satu syarat mempertahankan status UHC Prioritas (Non Cut Off) pada tahun 2026
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,99	1,31	75,57		
		Indeks Pembangunan Keluarga	61,90	62,70	101,29		
1.2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,15	8,37	102,70	Pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, realisasi sebesar 8,37 tahun atau	a. Meningkatkan akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						102,70% dari target menunjukkan kinerja yang sangat baik. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan, seperti program pencegahan putus sekolah dan dukungan terhadap pendidikan kesetaraan.	formal. b. Memperkuat program pencegahan putus sekolah melalui kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah desa. c. Mendorong partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. d. Peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,27	12,51	101,96	Indikator Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan capaian yang melampaui target dengan realisasi 12,51 tahun atau 101,96% dari target. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya akses pendidikan bagi anak usia sekolah serta peningkatan ketersediaan layanan pendidikan dasar dan menengah.	a. Peningkatan pemerataan akses pendidikan pada seluruh wilayah. b. Penguatan program wajib belajar dan keberlanjutan pendidikan. c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. d. Peningkatan dukungan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke	5,56	5,50	98,92		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)					
		Indeks Pembangunan Manusia	74,06	74,97	101,23		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71,48	1,82	2,55		
1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	7,55 - 8,33	7,87	100,89		
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	5,50	0,20	3,64		
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	0,365 - 0,372	0,369	99,86		
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	13.221,39	13.400,00	101,35		
1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,22	57,22	100,00	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Tahun 2025 mendekati target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Meningkatkan intensitas pembinaan komunitas seni dan budaya, memperluas jangkauan kegiatan kebudayaan ke seluruh wilayah, serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						daerah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta terlaksananya program pembinaan seni dan budaya secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek pendukung kebudayaan yang perlu dioptimalkan, khususnya dalam pemerataan kegiatan dan sarana pendukung kebudayaan.	dalam pelestarian budaya daerah.
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,80	85,00	99,07	Capaian sudah mendekati target.	Mempertahankan dan memperkuat pembinaan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama dan deteksi dini potensi konflik.
1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,54	0,548* Data rilis BPS Mei 2025	101,48		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,08	88,57	100,45		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,35	N/A	N/A		
		Indeks Desa	482,15	509,78	105,73	Indeks Desa sebagai alat bantu untuk mengukur	Mensosialisasikan ke desa

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						kemandirian desa yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan desa serta memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan desa.	
		Persentase Desa Mandiri (%)	42,08	52,46	124,67	Peningkatan persentase Desa Mandiri menunjukkan adanya transformasi desa dari kategori berkembang menuju kemandirian. Hal ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat serta optimalisasi potensi local desa.	Meningkatkan kualitas potensi desa dengan adanya pembinaan-pembinaan agar kemandirian desa meningkat.
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,26	66,25	98,50		
		Indeks Profesionalitas ASN	79,94	84,90	106,20	Keberhasilan melampaui target menunjukkan bahwa program pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, serta pembinaan integritas ASN telah berjalan efektif. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan disiplin, serta penerapan manajemen ASN	• Melanjutkan dan memperluas program pelatihan berbasis kebutuhan jabatan dan kompetensi. • Melaksanakan sistem manajemen talenta dan Memperkuat pemetaan kompetensi ASN.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						berkontribusi positif terhadap peningkatan profesionalitas ASN.	• Meningkatkan pengawasan disiplin dan etika ASN secara konsisten. • Mendorong ASN mengikuti sertifikasi kompetensi dan pendidikan lanjutan.
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.							
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	85,18	81,60	95,80		
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	64,23	69,99	108,97		
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	85,18	81,60	95,80	Adanya penambahan jumlah ruas jalan kabupaten dari 728 km menjadi 766 km. Panjang jalan terbaru tertuang dalam SK Bupati No. 973 Tahun 2023. Adanya penambahan Panjang jalan ini otomatis akan menurunkan nilai persentase kemantapan Jalan karena rumus Kemantapan Jalan adalah Jalan kondisi Baik dibagi Panjang Jalan keseluruhan di Kabupaten.	Untuk mencapai target yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Kemantapan Jalan untuktahun 2026 agar menambah anggaran. Ruas panjang dalam SK Bupati termasuk dengan Jalan Lingkungan dan Jalan Desa yang seharusnya menjadi Kewenangan Distarkim. Dalam SK berikutnya harusnya hanya Jalan Kabupaten saja yang menjadi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Kewenangan DPUTR yang dimasukkan.
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	81,13	69,56	85,74		
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	91,88	79,85	86,91	Hal ini didukung oleh peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM), serta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sarana yang telah dibangun.	Melakukan pemeliharaan rutin infrastruktur air minum, memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang belum terlayani secara maksimal, serta meningkatkan kualitas air melalui pengawasan berkala dan edukasi kepada masyarakat.
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	83,81	83,01	99,05	Realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan, didukung oleh peningkatan pembangunan sarana sanitasi, program pemberdayaan masyarakat, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak.	Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan sarana sanitasi, melakukan edukasi berkelanjutan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, serta memastikan keberlanjutan program melalui kolaborasi lintas sektor.
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,03	27,78	92,51	Hal ini didukung oleh peningkatan kapasitas jaringan distribusi, pengelolaan yang lebih baik oleh penyedia layanan, serta investasi pada infrastruktur	Melakukan pengembangan jaringan perpipaan ke wilayah yang belum terjangkau, meningkatkan kualitas layanan distribusi air, serta memperkuat manajemen

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						air minum.	operasional agar layanan tetap optimal dan berkelanjutan.
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	60,94	59,20	97,14	keberhasilan program penyediaan hunian layak melalui bantuan perumahan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta dukungan kebijakan perumahan yang tepat sasaran.	Melanjutkan program bantuan perumahan secara berkelanjutan, meningkatkan akurasi data penerima manfaat, serta mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan hunian layak.
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	64,23	69,99	108,97	Capaian melampaui target menunjukkan kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik. Keberhasilan dipengaruhi oleh pengendalian pencamaran, stabilitas kualitas udara dan air, serta sinergi lintas sektor. Namun perlu konsistensi dengan indikator teknis lainnya.	Menetapkan target lebih progresif, memperkuat integrasi data lingkungan, meningkatkan pengawasan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,08	4,11	58,05	Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang memadai.	Melakukan evaluasi berkala terhadap keberfungsian sarana sanitasi, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang konsisten.
		Timbulan Sampah	3,60	4,00	111,11	Capaian melebihi target	Meningkatkan kapasitas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)				menunjukkan peningkatan kapasitas dan efektifitas fasilitas pengolahan sampah. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pada aspek teknis operasional pengolahan.	fasilitas, memperluas program pemilahan dari sumber, serta mengembangkan kemitraan dengan bank sampah dan sektor swasta.
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	79,71	64,85	81,36	Capaian belum memenuhi target. Kendala kemungkinan disebabkan keterbatasan armada, jangkauan layanan dan anggaran operasional. Meski demikian, tingkat capaian menunjukkan progres yang cukup signifikan.	Penambahan armada dan optimalisasi rute, peningkatan anggaran operasional, perluasan cakupan layanan serta edukasi masyarakat.
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	90,00	102,68	87,65		
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)	279.711,36	N/A	N/A	Tidak terdapat realisasi sehingga target tidak tercapai. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi program mitigasi perubahan iklim serta belum tersedianya system inventarisasi emisi yang terstruktur.	Menyusun inventarisasi GRK Sektoral, menetapkan rencana aksi penurunan emisi, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan kapasitas SDM dalam penghitungan emisi.
Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.							
3	Memperkuat	Prevalensi	4,21	4,07	103,44		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan	Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)					
3.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)	9,60	-3,15	-32.82		
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,21	4,07	103,44		
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3,18	N/A	N/A		
		Indeks Ketahanan Pangan	80,98	74,44	91,92		
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	6,57	1,00	15,23		
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.							
4	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,9 - 7,51	7,54	95,56		
		Pertumbuhan Ekonomi	4,78 - 5,19	5,26	105,52		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Inflasi (%)	0,91	2,11	42,94		
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	8,46	9,20	108,75		
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	84,92 - 85,28	89,22	104,84		
		Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	100,00	100,00		
4.1	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,16	1,23	106,03		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)"	2,98	2,81	94,29		
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6,9 - 7,51	7,54	95,56		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,9 - 7,51	7,54	95,56		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,50	46,60	100,22		
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)	71,32	N/A	N/A		
		Pembentukan Modal	23,32	23,04	98,81		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Tetap Bruto (% PDRB)					
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19,85	22,08	111,23		
		Pertumbuhan Ekonomi	4,78 – 5,19	5,26	105,52		
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	86,43	86,60	100,20	Tercapainya Persentase Koperasi Aktif sebesar 86,6% atau 100% dari target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi di daerah tetap terjaga dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam memastikan koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menyampaikan laporan secara tertib, serta mempertahankan status aktifnya. Secara substansi, kondisi tersebut tidak hanya merefleksikan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menunjukkan perkembangan	• Mengarahkan pembinaan koperasi berbasis penilaian kesehatan dan kinerja usaha koperasi. • Memperkuat monitoring koperasi melalui pendekatan berbasis risiko dan keberlanjutan usaha. • Mendorong koperasi aktif untuk meningkatkan kualitas RAT dan tata kelola usaha

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						indikator kesehatan usaha koperasi, antara lain peningkatan volume usaha, penerapan tata kelola yang profesional, serta kemampuan dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan.	
		Pertumbuhan UMKM	1,55	13,16	846,70	Realisasi pertumbuhan UMKM sebesar 13,16% atau 100% dari target yang telah ditetapkan menunjukkan efektivitas implementasi program pemberdayaan dalam mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha. Capaian ini berdampak positif terhadap perluasan basis usaha dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, yang secara agregat berkontribusi pada penguatan struktur, inklusivitas, dan ketahanan perekonomian daerah. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tersebut telah diikuti oleh peningkatan kinerja usaha yang tercermin dari kenaikan omzet secara	• Menggeser fokus kebijakan dari pertumbuhan jumlah ke UMKM naik kelas. • Menyusun segmentasi UMKM berdasarkan level usaha dan kebutuhan intervensi. • Memperkuat akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, dan digitalisasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						signifikan, peningkatan kapasitas dan skala produksi, penguatan tata kelola serta manajemen usaha yang lebih profesional, dan percepatan transformasi UMKM untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. Dengan demikian, capaian kinerja ini tidak hanya merepresentasikan pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan daya saing UMKM. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program pemberdayaan serta fondasi yang kuat dalam mendorong pengembangan UMKM yang tangguh, adaptif dan berdaya saing.	
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	84,92 - 85,28	89,22	104,84		
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap	69,24	67,19	97,04	Ketergantungan pada rilis data makro BPS yang bersifat tahunan, sehingga	• Menyusun indikator antara (proxy/leading indicator) sektor perdagangan.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		PDRB				pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi ini membatasi kemampuan perangkat daerah dalam melakukan evaluasi kinerja secara periodik	• Memperkuat koordinasi dengan BPS dan Bapperida terkait sinkronisasi data. • Mengembangkan sistem monitoring kinerja perdagangan berbasis data operasional
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	8,46	9,20	108,75	• Proses perizinan berjalan efektif • Kepastian usaha • Koordinasi lintas OPD berjalan fungsional • ketergantungan terhadap faktor eksternal • keterbatasan kualitas dan belum optimalnya efektivitas pelaksanaan anggaran ketersediaan data kinerja • keterbatasan sumber daya manusia	• penguatan perencanaan berbasis kinerja dan risiko • peningkatan kualitas sistem data dan informasi kinerja • optimalisasi pelaksanaan anggaran berbasis hasil • pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,20	1,23	102,39		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,52	10,52	100,00	Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mencapai target	Meningkatkan promosi dan pengembangan destinasi wisata unggulan, memperkuat kolaborasi dengan pelaku

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan promosi destinasi wisata, keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata, serta masih terbatasnya keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan sektor pariwisata.	usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong peningkatan kualitas layanan dan daya tarik
		Tingkat Inflasi (%)	0,91	2,11	42,94		
4.2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	100,00	100,00		
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100,00	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas Perangkat Daerah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian indikator ini mencapai 100%, sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa	Akan mempertahankan Tingkat keberhasilan penanganan gangguan Trantibum yang terjadi di wilayah kabupaten purwakarta

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						sebagian besar gangguan Trantibum yang terjadi di wilayah kerja dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.							
5	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	85,23	86,26	101,20		
		Indeks Pelayanan Publik	4,62	4,51	97,61		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,97	3,94	99,24		
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,00		
5.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,97	3,94	99,24	Target tercapai berkat implementasi tata kelola SPBE yang konsisten, dukungan infrastruktur TIK, serta peningkatan layanan berbasis elektronik.	Mendorong integrasi aplikasi lintas perangkat daerah dan peningkatan kualitas arsitektur SPBE.
		Indeks Inovasi Daerah	49,40	49,60	100,40	Dapat melampaui target dikarenakan terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan, pendampingan	Melanjutkan dan memperluas sosialisasi, pendampingan inovator, serta optimalisasi pemanfaatan sistem SIRIKSA agar lebih banyak inovasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						bagi para inovator, serta tersedianya sistem informasi SIRIKSA sebagai sarana penjaringan inovasi sebelum penginputan ke Indeks Inovasi Daerah.	terdata dan berkualitas
		Nilai SAKIP Kabupaten	66,67	66,08	99,12		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,39	92,11	101,90		
		Indeks Pelayanan Publik	4,62	4,51	97,61		
		Indeks Reformasi Birokrasi	85,23	86,26	101,20	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dinilai 100 persen dengan nilai realiasi mencapai 86,26 karena seluruh komponen dan area perubahan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai rencana kerja, serta dokumen pendukung telah disusun dan diunggah sesuai dengan ketentuan sistem penilaian Reformasi Birokrasi	Melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian eviden pada sistem penilaian Reformasi Birokrasi, mempercepat tindak lanjut atas catatan hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta melakukan validasi internal sebelum proses penilaian eksternal.
		Sistem Merit Kabupaten	284,30	286,00	100,60	Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, khususnya melalui digitalisasi tata kelola, telah berjalan	• Menyempurnakan sistem informasi kepegawaian terintegrasi. • Meningkatkan kualitas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						dengan baik. Proses pengisian jabatan, promosi, mutasi, dan pengembangan karier semakin objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.	data kepegawaian agar lebih akurat dan mutakhir.
		Nilai LPPD Kabupaten	3,4147	N/A	N/A		
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100,00		
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,274	1,261	98,95		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,746	70,2175	86,96	Indeks pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Secara 3 Tahun berturut-turut telah mencapai kategori perlu perbaikan dan pada tahun 2024 meraih nilai 79,952 Artinya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah di Purwakarta masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya yaitu dengan kategori kinerja “Baik”	Melaksanakan perbaikan pemenuhan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai maksimal Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dergan 15 (lima belas), Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh), Transparansi Pengeloaan Keueangan Daerah sama dengan 15 (lima selas), Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);, Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima beles),

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							dan Opini Bedan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,108	3,237	104,159	Capaian Maturitas SPIP mencapai target karena penerapan pengendalian intern telah dilaksanakan secara konsisten, didukung oleh pemetaan risiko, pelaksanaan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi yang terdokumentasi pada setiap perangkat daerah	Memperkuat kualitas dokumentasi pengendalian, melakukan evaluasi efektivitas pengendalian secara berkala, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SPIP untuk peningkatan level maturitas selanjutnya.
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,209	3,028	94,357		
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,77	0,510	66,30		
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)	100,00	N/A*	N/A*		
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	44,65	57,790	129,44		
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	94,72	84,14	88,83		

TABEL 3.7

PROGRAM YANG MENUNJANG CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.							
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	100,28				
		Indek Pembangunan Manusia	101,23				
		Tingkat Kemiskinan (%)	100,89				
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	99,07				
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)					
1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	100,28	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan • Tingkat Pengendalian Infeksi di RS • Capaian Indikator Medik • Prosedur Penanganan Sampel Uji • Pengendalian Mutu • Bed Occupancy Rate (BOR) • Ketepatan Waktu Pelayanan • Temuan Yang di Tindaklanjuti (Temuan ketidaktersediaan Media dan	103,37	Menunjang
		Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (kasus)	250,00				
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	458,54				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		pada Balita (%)			Reagensia dan Temuan Hasil Telusur) • Tingkat Kehandalan Sumber Daya • Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi • Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil • Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan • Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir • Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar • Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	101,96				
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	103,48				
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	102,93				
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	75,57				
		Indeks Pembangunan Keluarga	101,29				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					sesuai standar • Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar • Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar • Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar • Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara penderita		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan • Rasio posyandu per satuan balita • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan • Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) • Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan • Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak • Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk • Cakupan balita pneumonia yang ditangani		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA • Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) • Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) • Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS • Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD • Penderita diare yang ditangani • Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir • Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS • Cakupan kunjungan bayi • Cakupan puskesmas • Cakupan pelayanan nifas • Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani • Cakupan pelayanan anak balita • Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) • Cakupan penderita Polio yang ditangani		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Cakupan Penemuan kasus TBC • Cakupan Kasus TBS sensitif Obat yang memulai pengobatan • Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	• Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan • Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan • Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar • Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan • Rasio dokter per satuan penduduk • Rasio tenaga medis per satuan penduduk • Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	109,22	Menunjang
				Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	• Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan • Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina • Persentase apotek, toko obat, dan usaha terkait yang memiliki izin resmi • Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat P-IRT • Persentase tempat pengelolaan makanan yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	102,94	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase makanan jajanan yang mendapat pembinaan keamanan pangan		
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	• Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan • Persentase kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina • Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan dibandingkan dengan target yang ditetapkan	77,04	Tidak Menunjang
				Pengendalian Penduduk	• TFR (Angka Kelahiran Total) • Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk • Rata-rata jumlah anak per keluarga • Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	99,12	Menunjang
				Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	• Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) • Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) • Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) • Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui	139,80	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					Kampung KB • Ratio Akseptor KB • Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 • Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) • Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) • Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) • Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi • Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi • Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB • Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB • Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB • Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB • Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan • Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					(PPKS) di setiap Kecamatan • Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa • Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa • Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk • Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri • Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan • Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat • Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		
				Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	• Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	106,98	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa • Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) • Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga • Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga • Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak • Rata-rata usia kawin pertama wanita		
1.2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	102,70	Pengelolaan Pendidikan	• Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD • Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar • Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama • Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan • Jumlah Warga Negara usia 7- 15	125,39	Menunjang
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	101,96				
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	98,92				
		Indeks	101,23				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Pembangunan Manusia			tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	2,55		• Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan • Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional • Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD • Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Angka partisipasi kasar • Angka pendidikan yang ditamatkan • Angka Partisipasi Murni • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A • Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B • Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A • Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B • Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI • Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs • Angka Kelulusan (AL) SD/MI • Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs • Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					ke SMP/MTs • Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA • Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik • Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik • Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar • Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar • Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki • Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) • Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) • Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) • Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) • Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional • Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B • Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 • Indeks Iklim Keamanan SD • Indeks Iklim Kebinekaan SD • Indeks Inklusivitas SD • Indeks Iklim Keamanan SMP • Indeks Iklim Kebinekaan SMP • Indeks Inklusivitas SMP • Skor Kemampuan Literasi jenjang SD • Skor Kemampuan Literasi jenjang SMP • Skor Kemampuan Numerasi jenjang SD • Skor Kemampuan Numerasi jenjang SMP • Angka Partisipasi Sekolah (5-6) jenjang PAUD • Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 jenjang SD/SMP • Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan jenjang Kesetaraan • Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B jenjang PAUD • Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 jenjang PAUD		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pengembangan Kurikulum	• Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan • Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan • Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal • Persentase buku muatan lokal yang tersedia terhadap kebutuhan • Persentase tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal • Cakupan sekolah yang menerapkan model pembelajaran inovatif muatan lokal	99,46	Tidak Menunjang
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar • Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar • Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,57	Menunjang
				Pengendalian Perizinan Pendidikan	• Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat • Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat • Persentase Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					berijin • Persentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang berijin		
				Pengembangan Bahasa dan Sastra	• Persentase karya Bahasa dan sastra yang dikembangkan	100,00	Menunjang
				Pembinaan Perpustakaan	• Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat • Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat • Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah • Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital • Laju pengunjung perpustakaan • Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun • Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina • Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik • Laju Anggota Perpustakaan • Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	176,31	Menunjang
				Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	• Persentase naskah kuno yang dilestarikan	161,29	Menunjang
1.3	Terwujudnya perlindungan sosial yang	Tingkat Kemiskinan (%) Persentase	100,89	Pemberdayaan Sosial	• Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	adaptif	Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			• Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina		
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	99,86				
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu)	101,35				
				Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	• Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	0	Tidak Menunjang
				Rehabilitasi Sosial	• Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti • Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti • Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti • Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti • Jumlah warga negara gelandangan dan	79,46	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti • Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial • Persentase PMKS yang tertangani		
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Persentase anak terlantar yang dibina • Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	50,00	Menunjang
1.4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	100,00	Pengembangan Kebudayaan	• Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi • Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina • Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan • Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	100,00	Menunjang
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	99,07				
				Pengembangan Kesenian Tradisional	• Penyelenggaraan festival seni dan budaya • Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina • Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	100,00	Menunjang
				Pembinaan Sejarah	• Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	100,00	Menunjang
				Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	• Terlestarikannya Cagar Budaya • Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu • Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		
				Pengelolaan Permuseuman	• Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat • Tingkat pertumbuhan jumlah pengunjung museum	99.90	Tidak Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	• Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan • Persentase Kegiatan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	56,84	Tidak Menunjang
1.5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	• Persentase ARG pada belanja langsung APBD • Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah • Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR • Partisipasi perempuan di lembaga swasta • Partisipasi angkatan kerja perempuan • Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian • Persentase lembaga pemberdayaan	72,08	Tidak Menunjang
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
		Indeks Desa	105,73				
		Persentase Desa Mandiri (%)	124,67				
		Tingkat Partisipasi	98,50				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Angkatan Kerja (TPAK)			perempuan yang dibina		
		Indeks Profesionalitas ASN	106,23				
				Perlindungan Perempuan	• Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) • Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu • Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	89,63	Tidak Menunjang
				Peningkatan Kualitas Keluarga	• Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga • Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap layanan peningkatan kualitas keluarga	108,33	Menunjang
				Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	• Data Gender Anak • Data Gender Anak terkini (Ada/Tidak)	50,00	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pemenuhan Hak Anak (PHA)	• Persentase Pemenuhan Hak Anak	59,00	Tidak Menunjang
				Perlindungan Khusus Anak	• Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0	Tidak Menunjang
				Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja • Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi • Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	193,38	Menunjang
				Penataan Desa	• Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100,00	Menunjang
				Peningkatan Kerja Sama Desa	• Persentase kerjasama desa yang difasilitasi • Persentase pembangunan kawasan perdesaan	78,60	Tidak Menunjang
				Administrasi Pemerintahan Desa	• Persentase peningkatan status desa mandiri • Persentase desa tertib administrasi • Persentase pembinaan BUM Desa	159,70	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase penertiban aset desa • Persentase kepala desa yang dibina • Persentase aparatur desa yang dibina		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	• Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) • Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK • Persentase LSM aktif • Persentase PKK aktif • Persentase Posyandu aktif • Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100,00	Menunjang
				Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	• Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri • Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan • Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif • Persentase Wirausaha Muda • Persentase Pembinaan Kepemudaan	100,00	Menunjang
				Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	• Tingkat prestasi olahraga • Cakupan Pembinaan Olahraga • Cakupan Pembinaan Atlet Muda • Cakupan Pelatih yang bersertifikasi • Tingkat atlet berprestasi • Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	87,92	Tidak Menunjang
				Pengembangan	• Persentase organisasi kepramukaan	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Kapasitas Kepramukaan	yang dibina		
				Perencanaan Kawasan Transmigrasi	• Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	100,00	Menunjang
				Pembangunan Kawasan Transmigrasi	• Persentase transmigran swakarsa • Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih • Persentase transmigran yang diberangkatkan	100,00	Menunjang
				Pengembangan Kawasan Transmigrasi	• Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	0	Tidak Menunjang
				Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan • Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal • Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural • Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	101,70	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	85,18	Tidak Menunjang
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan.							
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan	95,80				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	dasar yang ramah lingkungan dan merata di semua wilayah	kabupaten/kota					
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	108,97				
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	95,80	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	• Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase penduduk berakses air minum • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan • Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari • Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	64,37	Tidak Menunjang
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	85,74				
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	86,91				
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	99,05				
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	92,51				
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan	97,14				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Berkelanjutan (%)					
				Penyelenggaraan Jalan	• Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota • Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik • Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk • Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan • Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi • Persentase jembatan yang dalam kondisi baik	38,99	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLLAJ)	• Rasio konektivitas kabupaten/kota • Rasio konektivitas kabupaten/kota • Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota • Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan) • Rasio ijin trayek • Rasio ijin trayek • Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan) • Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis • Persentase layanan angkutan darat • Persentase kepemilikan KIR angkutan umum • Pemasangan Rambu- rambu • Rasio panjang jalan per jumlah	104,33	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					kendaraan • Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum • Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun • Persentase pemanfaatan layanan angkutan (load faktor) • Persentase kendaraan angkutan laik jalan • Persentase perlengkapan jalan yang terpasang • Laju peningkatan pengguna angkutan umum • Persentase kelengkapan fasilitas terminal		
				Pengelolaan Pelayaran	• Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin • Persentase Pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	30,00	Tidak Menunjang
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	• Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia • Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	100,00	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik • Persentase rumah tinggal bersanitasi • Jumlah Warga Negara yang	58,87	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik • Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan yang Dibangun / Diperbaiki	100,00	Menunjang
				Pengembangan Permukiman	• Persentase areal kawasan kumuh • Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	100,00	Menunjang
				Penataan Bangunan Gedung	• Rasio kepatuhan IMB kab/ kota • Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat • Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	92,28	Tidak Menunjang
				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	• Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	88,78	Tidak Menunjang
				Pengembangan Jasa Konstruksi	• Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi • Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi • Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	45,31	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	74,32	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan • Ketaatan terhadap RTRW		
				Pengembangan Perumahan	• Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota • Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi • penyediaan rumah yang layak huni • Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota • Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) • Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) • Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80,85	Tidak Menunjang
				Kawasan Permukiman	• Rasio rumah layak huni • Rasio permukiman layak huni • Cakupan ketersediaan rumah layak huni • Cakupan ketersediaan rumah layak huni • Cakupan layanan rumah layak huni	90,08	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					yang terjangkau • Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau • Persentase pemukiman yang tertata		
				Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	• Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh • Persentase Kawasan Permukiman dengan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak	100,00	Menunjang
				Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	• Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) • Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU • Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) • Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	83,33	Tidak Menunjang
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	• Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	100,00	Menunjang
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	100,00	
				Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	• Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan • Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	60,00	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	• Persentase tanah absentee dan kelebihan maksimum yang telah diberikan kepada subjek yang sah	0	Tidak Menunjang
				Pengelolaan Tanah Kosong	• Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	76,00	Tidak Menunjang
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	108,97	Perencanaan Lingkungan Hidup	• Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota • Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota • Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten • Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (ada/tidak ada) • Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (ada/tidak ada) • Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten (ada/tidak ada)	100,00	Menunjang
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	58,05				
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)					
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)					
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level kabupaten/kota)	87,65				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (Ton Co2eq)					
				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	• Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim • Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air • Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara • Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	111,45	Menunjang
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	• Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun • Persentase luas kawasan lindung / konservasi keanekaragaman hayati	50,00	Tidak Menunjang
				Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	• Jumlah limbah B3 yang dikelola • Persentase limbah B3 yang dikelola dengan baik	0	Tidak Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	• Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota • Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	111,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota • Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota • Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan		
				Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	• Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA • Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional • Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional • Penetapan hak MHA • Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana • Persentase MHA yang telah mendapatkan pengakuan hukum daerah • Persentase MHA yang telah menerima pendampingan dan pemberdayaan • Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	37,50	Tidak Menunjang
				Penanganan	• Pengaduan masyarakat terkait izin	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pengaduan Lingkungan Hidup	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		
				Pengelolaan Persampahan	• Timbulan sampah yang ditangani • Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R • Persentase cakupan area pelayanan • Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota • Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	63,49	Tidak Menunjang
				Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	• Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan • Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat • Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	91,67	Tidak Menunjang
				Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	• Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup • Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	30,00	Tidak Menunjang
				Penanggulangan Bencana	• Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana • Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	71,07	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Persentase pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi		
				Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	• Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran • Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran • Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota • Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) • Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah • Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan	114,69	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					Penyelamatan/Perangkat Daerah		
				Penanganan Bencana	• Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota • Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	87,50	Tidak Menunjang
3	Memperkuat ketahanan energi air dan pangan yang berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	103,44				
3.1	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produksi Listrik (%)	-32.82	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	• Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	100,00	Menunjang
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	103,44				
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)					

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Indeks Ketahanan Pangan	91,92				
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	15,23				
				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	• Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100,00	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan	• Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	100,00	Menunjang
				Pengawasan Keamanan Pangan	• Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Perikanan Tangkap	• Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap • Produksi perikanan • Konsumsi ikan • Cakupan bina kelompok nelayan • Laju Produksi perikanan kelompok nelayan • Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman • Produksi Perikanan Tangkap • Produksi perikanan kelompok nelayan	116,65	Menunjang
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	• Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya • Poduksi Ikan Konsumsi	178,63	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Produksi Benih Ikan UPR • Produksi Benih Ikan BBI • Produksi Ikan Hias • Produksi Perikanan budidaya • Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina • Persentase usaha perikanan budidaya yang memiliki izin usaha • Persentase pembudi daya ikan kecil yang mendapatkan bantuan atau pembinaan • Rasio jumlah usaha perikanan budidaya aktif terhadap total usaha perikanan		
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	• Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi • Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan • Persentase kasus pelanggaran perikanan yang ditindaklanjuti • Persentase wilayah perairan yang diawasi secara berkala	89,75	Tidak Menunjang
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	• Produksi Olahan Produk Perikanan • Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan • Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	60,86	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan • Persentase penyediaan bahan baku terhadap kebutuhan industri pengolahan ikan • Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita		
				Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	• Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular • Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik • Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) • Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan • Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) • Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) • Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) • Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) • Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat	136,68	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					(HAUS) • Persentase populasi hewan yang diperiksa kesehatannya • Persentase produk hewan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner • Tingkat kepatuhan unit usaha terhadap persyaratan kesehatan masyarakat veteriner • Persentase kasus zoonosis yang berhasil dikendalikan		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	• Persentase Pengendalian Serangan OPT • Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim • Persentase penurunan luas serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan • Persentase penurunan kerugian akibat perubahan iklim pada sektor pertanian • Persentase penurunan lahan pertanian terdampak kebakaran dan gangguan usaha	90,00	Menunjang
				Perizinan Usaha Pertanian	• Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	100,00	Menunjang
				Penyuluhan Pertanian	• Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	• Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	96,69	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		
				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	• Pertumbuhan Produksi Peternakan • Cakupan Akseptor IB • Persentase bibit ternak bersertifikat • Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	92,57	Tidak Menunjang
				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• Persentase RPH sesuai standar • Persentase peningkatan aksesibilitas dan kualitas prasarana pertanian (ternak)	86,46	Menunjang
Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.							
4	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	95,56				
		Pertumbuhan Ekonomi	105,52				
		Tingkat Inflasi (%)	42,94				
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	108,75				
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	104,84				
		Persentase penanganan trantibumlinma	100,00				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		s (%)					
4.1	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	96,50	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	• Persentase ijin usaha simpan pinjan untuk koperasi yang diterbitkan • Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	100,00	Menunjang
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)"	106,03				
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)					
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	95,56				
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	100,22				
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (poin)					
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	98,81				
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	111,23				
		Pertumbuhan Ekonomi	105,52				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	100,20				
		Pertumbuhan UMKM	846,70				
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	104,84				
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	97,04				
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	108,75				
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	102,39				
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	100,00				
		Tingkat Inflasi (%)	42,94				
				Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	• Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	79,36	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala • Persentase koperasi dengan tata kelola yang memenuhi standar		
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	• Meningkatnya Koperasi yang berkualitas • Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian • Persentase peningkatan kualitas koperasi • Persentase KSP/USP Koperasi dengan kategori sehat	70,08	Tidak Menunjang
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	• Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	• Persentase peningkatan omset pendapatan koperasi	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	• Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha • Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha • Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha • Tingkat Wirausaha Baru (WUB) • Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	96,88	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		
				Pengembangan UMKM	• Persentase Usaha Mikro dan Kecil • Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	100,00	Menunjang
				Pengembangan Iklim Penanaman Modal	• Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota • Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) • Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) • Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	283,35	Menunjang
				Promosi Penanaman Modal	• Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan • Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun) • Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi • Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi • Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi	74,46	Tidak Menunjang
				Pelayanan Penanaman Modal	• Rasio daya serap tenaga kerja • Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan • Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat • Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi	87,87	Tidak Menunjang
				Pengendalian	• Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat	91,24	Tidak

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pelaksanaan Penanaman Modal	Dimonitoring Secara Berkala • Rasio daya serap tenaga kerja • Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani • Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal		Menunjang
				Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	• Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100,00	Menunjang
				Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	• Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) • Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100,00	Menunjang
				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	• Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100,00	Menunjang
				Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	• Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya • Persentase kinerja realisasi pupuk • Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting • Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok terhadap jumlah permintaan pasar	93,75	Menunjang
				Pengembangan	• Tingkat Nilai Export bersih	132,07	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Ekspor	• Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang • Ekspor Bersih Perdagangan • Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah		
				Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	• Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100,00	Menunjang
				Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	• Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi • Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta • Persentase kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan	33,33	Tidak Menunjang
				Perencanaan dan Pembangunan Industri	• Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP • Cakupan bina kelompok pengrajin • Persentase rata-rata capaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK • Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya	91,58	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					menjadi PERDA • Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten		
				Pengendalian Izin Usaha Industri	• Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi • Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait • Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait • Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	96,60	Menunjang
				Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	• Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini • Diseminasi, publikasi data informasi dan analisia industri yang dilaksanakan • Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas • Persentase kawasan industri yang melaporkan data ke SIINas	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	• Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan • Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota • Tingkat hunian akomodasi • Kunjungan wisata • Lama kunjungan Wisata • Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi • Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat • Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan • Persentase jumlah daya tarik wisata unggulan yang ditetapkan • Persentase destinasi wisata yang memenuhi standar pengelolaan berkelanjutan	94,59	Tidak Menunjang
				Pemasaran Pariwisata	• Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan • Persentase destinasi wisata yang diminati • Persentase pertumbuhan usaha pariwisata lokal	68,02	Tidak Menunjang
				Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	• Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan • Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	87,56	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Hak Kekayaan Intelektual			
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	• Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina • Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan akses fasilitasi (pendanaan, pemasaran, sertifikasi)	77,03	Tidak Menunjang
				Penempatan Tenaga Kerja	• Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota • Persentase jumlah tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan dibanding total tenaga kerja • Persentase pekerja migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan perlindungan atau peningkatan kompetensi	180,51	Menunjang
				Hubungan Industrial	• Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). • Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun • Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) • Keselamatan dan perlindungan	64,83	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan • Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek • Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		
4.2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Persentase penanganan trantibumlinmas (%)	100,00	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	• Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan • Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan • Persentase penurunan gangguan ketertiban umum • Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota • Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) • Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) • Persentase Penegakan PERDA	85,71	Tidak Menunjang
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00				
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	• Tingkat penyelesaian konflik sosial	97,19	Tidak Menunjang
				Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	• Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80,84	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat • Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka		
				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	• Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades) • Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik • Persentase keterlibatan pemuda dalam pendidikan politik dan demokrasi	74,19	Tidak Menunjang
				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	• Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan • Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif • Persentase jumlah mediasi sengketa Ormas yang berhasil diselesaikan	100,00	Menunjang
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	• Tingkat penyelesaian konflik sosial • Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah	100,00	Menunjang
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan public yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.							
5	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	101,20				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	97,61				
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	99,24				
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	100,00				
5.1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	99,24	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Capaian SAKIP Perangkat Daerah • Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah • Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal	96,34	Menunjang
		Indeks Inovasi Daerah	100,40				
		Nilai SAKIP Kabupaten	99,12				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	94,04				
		Indeks Pelayanan Publik	97,61				
		Indeks Reformasi Birokrasi	101,20				
		Sistem Merit Kabupaten	100,60				
		Nilai LPPD Kabupaten					
		Opini BPK terhadap	100,00				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		laporan keuangan					
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	98,95				
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	86,96				
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	104,159				
		Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)	94,357				
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	66,30				
		Efektifitas Kerjasama Internasional (%)					
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (poin)	129,44				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	88,83				
				Pendaftaran Penduduk	• Perekaman KTP elektronik • Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk • Penerapan KTP Nasional berbasis NIK • Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	103,63	Menunjang
				Pencatatan Sipil	• Kepemilikan akta kelahiran • Rasio bayi berakte kelahiran • Rasio pasangan berakte nikah • Cakupan penerbitan akta kelahiran	98,31	Menunjang
				Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	• Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama • Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama • Persentase data kependudukan yang telah diverifikasi dan valid terhadap total data	133,90	Menunjang
				Pengelolaan Profil Kependudukan	• Profil data kependudukan	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	• Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90,19	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota • Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan • Akses publik terhadap informasi keuangan daerah • Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan • Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat • Persentase penyelesaian pengaduan publik		
				Pengelolaan Aplikasi Informatika	• Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo • Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif • Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi • Persentase integrasi aplikasi layanan pemerintah daerah • Persentase akses internet di fasilitas layanan publik	103,53	Menunjang
				Penyelenggaraan	• Persentase Organisasi Perangkat	102,93	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Statistik Sektoral	Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah • Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah • Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi • Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada) • Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan • Persentase perangkat daerah yang menerapkan prinsip Satu Data Indonesia • Persentase data sektoral yang tersedia dan sesuai standar		
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	• Tingkat keamanan informasi pemerintah • Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah • Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah • Persentase sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang telah menerapkan standar keamanan informasi	81,00	Menunjang
				Pengelolaan Arsip	• Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	237,02	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib • Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan • Persentase Penyusutan Arsip • Arsip Aktif • Arsip Inaktif • Arsip Vital • Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan • Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan • Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku • Persentase arsip statis yang sudah didigitalisasi		
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	• Tingkat Penyelamatan Arsip Statis • Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis • Tingkat Pelestarian Arsip Statis • Persentase arsip yang terselamatkan dari risiko kehilangan atau bencana • Persentase arsip yang dimusnahkan sesuai retensi dan peraturan • Persentase arsip statis yang telah dinilai dan ditetapkan autentisitasnya	1867,78	Menunjang
				Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten • Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan • Persentase produk hukum daerah yang	78,33	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					dapat diakses secara online • Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif		
				Perekonomian dan Pembangunan	• Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan • Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan • Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun • Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama • Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif • Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	65,92	Menunjang
				Pengelolaan Perbatasan	• Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	0	Menunjang
				Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	• Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota • Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	98,06	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD • Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan • Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan		
				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA • Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) • Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA • Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu • Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) • Capaian Kinerja RKPD • Persentase keterlibatan stakeholder dalam konsultasi publik	85,71	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	• Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pembangunan Daerah	manusia • Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam • Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Persentase implementasi rencana kelitbangan • Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan • Persentase penelitian yang diterapkan dalam kebijakan daerah	77,78	Menunjang
				Riset dan Inovasi Daerah	• Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. • Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. • Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah	69,33	Menunjang
				Pengelolaan Keuangan Daerah	• Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan • Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) • Opini Laporan Keuangan • Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD • Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	87,24	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					• Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya • Persentase SILPA terhadap APBD • Persentase belanja pendidikan (20%) • Persentase belanja kesehatan (10%) • Bagi hasil kabupaten/kota dan desa • Penetapan APBD • Kesesuaian Dokumen Penganggaran • Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD • Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah • Penyerapan Anggaran • Kondisi Keuangan Daerah • Persentase Penerbitan SP2D • Penyampaian Laporan Syarat Salur TKD yang Tepat Waktu • Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran • Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal • Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat • Persentase kesesuaian RKA-SKPD	46,29	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah • Persentase pengolah BMD yang dibina • Persentase penyusutan/ penghapusan BMD • Persentase pemusnahan/ penghapusan BMD • Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif • Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan • Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif • Administrasi BMD yang Andal		
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Rasio PAD • Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD • Rasio Pajak daerah • Rasio retribusi daerah • Persentase capaian PAD • Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	259,15	Menunjang
				Kepegawaian Daerah	• Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) • Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) • Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk	102,78	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					guru dan tenaga kesehatan) • Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah • Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah • Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah • Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai • Persentase Pemberhentian ASN • Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa • Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai • Tingkat penurunan pelanggaran disiplin ASN • Persentase keberhasilan pendidikan dan pelatihan ASN • Persentase jabatan struktural yang terisi • Persentase kenaikan pangkat pegawai yang diselesaikan tepat waktu		
				Penyelenggaraan Pengawasan	• Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) • Persentase tindak lanjut temuan • Jumlah temuan BPK • Persentase riviu laporan/dokumen yang dilaksanakan • Persentase desa yang mendapat pengawasan dan pembinaan	95,85	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	• Capaian MCP KPK • Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	52,99	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	• Indeks Kepuasan Masyarakat	113,25	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	• Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	95,80	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	• Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	90,33	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta selama tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp2.786.085.169.101. Pada akhir tahun 2025, anggaran yang terealisasi sebesar Rp2.427.693.258.869 atau sebesar 87,14% dari pagu yang telah dianggarkan. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 4, yaitu Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama sebesar 97,74%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 9, yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah sebesar 56,03%.

TABEL 3.8

CAPAIAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	131.342.150.572	119.232.171.176	90,78
2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	205.852.390.183	166.495.553.311	80,88
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang	3.478.109.537	2.311.028.100	66,44

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	adaptif			
4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	3.942.921.600	3.853.873.450	97,74
5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	24.083.904.549	22.005.189.400	91,37
6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	305.709.370.985	246.865.955.716	80,75
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	32.498.953.436	24.233.667.412	74,57
8	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian	31.605.750.185	27.382.476.215	86,64

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	pangan			
9	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	5.965.961.391	3.342.869.010	56,03
10	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	9.806.503.952	8.531.216.839	87,00
11	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	2.031.799.152.711	1.829.298.321.090	90,03

TABEL 3.9

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN TAHUN 2025

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Efisiensi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	118,21	90,78	1,3
2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	81,47	80,88	1,01
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	76,44	66,44	1,15
4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	99,54	97,74	1,02
5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	106,17	91,37	1,16
6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah	92,86	80,75	1,15
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi	89,43	74,57	1,20

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Efisiensi
	terhadap bencana dan perubahan iklim			
8	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	70,20	86,64	0,81
9	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	144,44	56,03	2,58
10	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	100,00	87,00	1,15
11	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	97,94	90,03	1,09

Nilai persentase efisiensi diatas 1 menunjukkan efisiensi positif. Sedangkan nilai capaian kinerja diatas 100 menandakan output atau hasil yang dicapai jauh di atas target yang ditetapkan. Rata-rata penggunaan anggaran relatif hemat namun hasil kinerja dapat tercapai. Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dari 11 sasaran terdapat 10 sasaran (90,90%) dapat dikatakan efisien dan efektif. Nilai persentase

efisiensi tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah sedangkan nilai persentase efisiensi terrendah terdapat pada sasaran Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Tantangan utama bukan sekadar besarnya anggaran, tetapi efektivitas penggunaannya. Fokus ke arah efisiensi, ketepatan sasaran, dan kualitas pelaksanaan akan menjadi kunci untuk meningkatkan capaian kinerja hingga mendekati capaian anggaran, bahkan mencapai target ideal.

Rekomendasi langkah selanjutnya untuk meminimalisir rendahnya tingkat efisien dapat dengan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan atau program pada sasaran tersebut, pilot project hemat biaya, identifikasi pemborosan, hambatan administratif, dan peluang efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Didalamnya terdapat potret pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025. Dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pembangunan pada tahun pertama RPJMD ini digambarkan melalui pencapaian 79 indikator kinerja sasaran strategis pembangunan. Ketercapaian kinerja mencapai atau melampaui target terjadi pada 40 indikator kinerja (50,63%), sementara pada 32 indikator kinerja (40,51%) belum mencapai target dan sebanyak 6 indikator kinerja (7,59%) belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena data belum rilis. Dilihat dari penyelenggaraan pembangunan, dapat disampaikan bahwa jumlah Capaian Indikator Kinerja tertinggi terjadi pada Misi III yaitu Menciptakan Iklim Investasi dan Stabilitas Keamanan dan Ekonomi yang Kondusif, Memperluas Akses Kesempatan Kerja, serta Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing sebesar 122,22% dengan capaian sasaran tertinggi pada Sasaran Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah sebesar 144,44%. Sedangkan jumlah capaian indikator kinerja terendah terjadi pada Misi II yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkarakter dan Merata di Seluruh Wilayah, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Hidup dan Kebencanaan, serta Memperkuat Ketahanan Energi, Air dan Pangan yang Berkelanjutan sebesar 84,16% dengan capaian sasaran terendah pada sasaran Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan sebesar 70,20%.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa perkembangan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian lima misi RPJMD di tahun pertama, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kondisi ini memberikan optimisme pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta di tahun terakhir RPJMD 2025-2029 dapat tercapai. Dukungan komitmen pimpinan yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang memadai, dan penerapan SPBE menjadi faktor pendorong yang kuat dalam menciptakan kondisi ini. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta menempuh berbagai langkah diantaranya:

1. Membangun komitmen dan kolaborasi dari pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan seluruh staff instansi yang bersangkutan;
2. Pemutakhiran sistem yang telah berjalan yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
4. Objektif, transparan dan akurat;
5. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh stakeholder terkait.
7. Review ulang dokumen perencanaan untuk indikator yang tidak ada nilai realisasi yang disebabkan ketidaksinkronan dan kurangnya kolaborasi penyusun perencanaan daerah dengan perangkat daerah pengampu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

MATRIKS PENCAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Misi 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, UNGGUL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF SERTA MEMILIKI KARAKTER DAN AKHLAK YANG BAIK

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% TINGKAT PENCAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk semua	PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	101.121.811.464	91.193.068.849	90,18
		PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	4.804.721.294	4.145.184.431	86,27
		PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (DINAS	9.777.905.000	8.763.215.923	89,62
		PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (DINAS	304.484.000	302.708.235	99,42
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)	596.184.270	552.774.375	92,72
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (RSUD BAYU ASIH)	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK	316.086.000	306.310.000	96,91
		PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.859.007.544	8.434.137.863	95,20
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.561.951.000	5.534.771.500	99,51
		JUMLAH 1	131.342.150.572	119.232.171.176	90,78
2	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.744.350.196	164.883.115.461	80,93
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KURIKULUM	365.500.000	296.280.000	81,06
		PROGRAM : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36.078.000	23.900.000	66,25
		PROGRAM : PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	22.796.000	10.610.000	46,54
		PROGRAM : PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	360.508.500	323.432.800	89,72
		PROGRAM : PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.263.683.837	910.408.250	72,04
		PROGRAM : PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	59.473.650	47.806.800	80,38
		JUMLAH 2	205.852.390.183	166.495.553.311	80,88
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL	679.341.502	659.611.500	97,10
		PROGRAM : PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL	584.455.800	551.230.600	94,32
		PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.214.312.235	1.100.186.000	0,00
		JUMLAH 3	3.478.109.537	2.311.028.100	66,44

4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama	PROGRAM : PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.693.589.350	3.646.440.700	98,72
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PEMBINAAN SEJARAH	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	77.220.000	77.220.000	100,00
		PROGRAM : PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	49.718.000	49.618.000	99,80
		PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	122.394.250	80.594.750	65,85
		JUMLAH 4	3.942.921.600	3.853.873.450	97,74
5	Meningkatnya produktivitas dan kesetaraan SDM serta pemberdayaan dalam pembangunan	PROGRAM : PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	236.934.500	158.360.400	66,84
		PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN	186.769.000	150.966.000	80,83
		PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	70.498.900	61.082.500	86,64
		PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	28.579.500	4.070.000	14,24
		PROGRAM : PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71.840.000	38.407.000	53,46
		PROGRAM : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.239.828.290	994.811.700	80,24
		PROGRAM : PENATAAN DESA	69.817.000	24.076.500	34,49
		PROGRAM : PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.328.216.800	1.204.152.919	90,66
		PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	946.139.350	460.152.250	48,63
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	670.890.900	274.114.920	40,86
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	583.077.500	436.188.500	74,81
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.134.502.900	5.961.619.590	97,18
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000	149.250.000	99,50
		PROGRAM : PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	30.457.500	27.237.500	89,43
		PROGRAM : PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	95.995.500	61.597.000	64,17
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.989.902.150	3.868.860.800	96,97
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.250.454.759	8.130.241.821	98,54
		JUMLAH 5	24.083.904.549	22.005.189.400	91,37
		JUMLAH TOTAL	368.699.476.441	288.038.752.587	78,12

MATRIKS PENCAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Misi 2 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKARAKTER DAN MERATA DI SELURUH WILAYAH, MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN HIDUP DAN KEBENCANAAN, SERTA MEMPERKUAT KETAHANAN ENERGI, AIR DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN.

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% TINGKAT PENCAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	**Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata disemua wilayah**	**PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**19.705.451.000**	**19.664.958.502**	**99,79**
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN	**148.100.123.492**	**97.657.821.463**	**65,94**
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**17.235.281.771**	**13.241.250.594**	**76,83**
		PROGRAM : PENGELOLAAN PELAYARAN	**160.000.000**	**0**	**0,00**
		PROGRAM : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**699.292.500**	**695.229.300**	**99,42**
		PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**10.336.295.456**	**10.325.956.437**	**99,90**
		PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA	**2.089.727.000**	**2.054.908.940**	**98,33**
		PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	**11.713.882.766**	**11.705.492.470**	**99,93**
		PROGRAM : PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**0**	**0**	**#DIV/0!**
		PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**19.421.480.500**	**17.921.612.394**	**92,28**
		PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**107.255.000**	**95.217.200**	**88,78**
		PROGRAM : PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**221.772.500**	**100.493.000**	**45,31**
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**2.484.347.000**	**2.393.469.050**	**96,34**
		PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**10.995.247.000**	**10.654.868.341**	**96,90**
		PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN	**45.036.873.000**	**43.783.830.762**	**97,22**
		PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**17.140.180.250**	**16.368.371.868**	**95,50**
		PROGRAM : PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**190.154.000**	**189.412.895**	**99,61**
		PROGRAM : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**0**	**0**	**#DIV/0!**
		PROGRAM : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**52.640.750**	**9.045.500**	**17,18**
		PROGRAM : REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM : TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	**0**	**0**	**#DIV/0!**
		PROGRAM : PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**19.367.000**	**4.017.000**	**20,74**
		JUMLAH 1	**305.709.370.985**	**246.865.955.716**	**80,75**

2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	PROGRAM : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	180.213.000	22.713.000	12,60
		PROGRAM : PENGENDALIAN PENCAMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.548.252.226	3.974.932.867	87,39
		PROGRAM : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	108.393.000	106.890.500	98,61
		PROGRAM : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	542.520.200	532.245.750	98,11
		PROGRAM : PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000	74.658.600	99,54
		PROGRAM : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	193.956.100	42.134.400	21,72
		PROGRAM : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.925.038.910	14.407.800.005	72,31
		PROGRAM : PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	146.332.000	137.805.000	94,17
		PROGRAM : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	18.623.000	15.393.000	82,66
		PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA	1.577.310.500	1.280.107.284	81,16
		PROGRAM : PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	4.807.067.500	3.303.880.600	68,73
		PROGRAM : PENANGANAN BENCANA	376.247.000	335.106.406	89,07
		JUMLAH 2	32.498.953.436	24.233.667.412	74,57
3	Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	20.296.250	9.798.000	48,27
		PROGRAM : PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	776.792.500	228.406.445	29,40
		PROGRAM : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42.484.500	17.824.500	41,96
		PROGRAM : PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	94.610.750	46.858.000	49,53
		PROGRAM : PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	376.501.785	51.685.200	13,73
		PROGRAM : PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	557.543.124	232.796.000	41,75
		PROGRAM : PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.445.000	8.685.000	83,15
		PROGRAM : PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	324.303.980	12.488.730	3,85
		PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	379.868.046	224.884.400	59,20
		PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	222.090.500	188.452.750	84,85
		PROGRAM : PERIZINAN USAHA PERTANIAN	28.075.000	27.792.000	98,99
		PROGRAM : PENYULUHAN PERTANIAN (DINAS PANGAN DAN PERTANIAN)	1.774.029.000	1.336.904.500	75,36
		PROGRAM : PENYULUHAN PERTANIAN (DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN)	231.222.000	222.621.000	96,28
		PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.632.394.000	23.817.267.190	96,69
		PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.268.676.250	866.417.500	68,29
		PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	866.417.500	89.595.000	10,34
		JUMLAH 3	31.605.750.185	27.382.476.215	86,64
		JUMLAH TOTAL	369.814.074.606	298.482.099.343	80,71

MATRIKS PENCAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Misi 3 : MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI DAN STABILITAS KEAMANAN DAN EKONOMI YANG KONDUSIF, MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA, SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% TINGKAT PENCAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1,	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah	PROGRAM : PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	164.947.500	104.095.300	63,11
		PROGRAM : PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	206.138.000	34.336.000	16,66
		PROGRAM : PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	80.637.000	68.070.000	84,42
		PROGRAM : PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	329.920.500	217.486.000	65,92
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	431.381.500	79.117.310	18,34
		PROGRAM : PENGEMBANGAN UMKM	851.318.716	49.900.000	5,86
		PROGRAM : PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	58.054.925	52.496.700	90,43
		PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL	99.180.000	16.501.400	16,64
		PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	103.486.900	46.792.300	45,22
		PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	108.027.500	93.871.700	86,90
		PROGRAM : PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	113.484.000	109.351.000	96,36
		PROGRAM : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	40.584.500	7.100.900	17,50
		PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9.185.000	0	0,00
		PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	277.908.500	277.908.500	100,00
		PROGRAM : PENGEMBANGAN EKSPOR	86.782.000	0	0,00
		PROGRAM : STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	123.828.200	120.242.600	97,10
		PROGRAM : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	5.989.000	0	0,00
		PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	546.945.250	174.663.000	31,93
		PROGRAM : PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	12.911.000	12.571.000	97,37
		PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	22.740.000	22.740.000	100,00
		PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	717.273.500	707.138.400	98,59
		PROGRAM : PEMASARAN PARIWISATA	75.829.000	72.829.000	96,04
		PROGRAM : PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	229.255.000	173.816.000	75,82
		PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	740.268.000	431.485.000	58,29
		PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	328.834.000	325.996.000	99,14
		PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL	201.051.900	144.360.900	71,80
		JUMLAH 1	5.965.961.391	3.342.869.010	56,03
2	Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	PROGRAM : PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.347.149.287	1.832.678.553	78,08
		PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93.727.180	65.697.000	70,09
		PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.605.424.485	1.387.653.400	86,44
		PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	3.176.287.500	3.176.287.500	100,00
		PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	422.020.000	238.382.000	56,49
		PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	2.161.895.500	1.830.518.386	84,67
		JUMLAH 2	9.806.503.952	8.531.216.839	87,00
		JUMLAH TOTAL	15.772.465.343	11.874.085.849	75,28

MATRIKS PENCAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Misi 4 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERINTEGRITAS SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERBASIS DIGITAL

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% TINGKAT PENCAPAIAN
[1]		[3]	[4]	[5]	[6]
1	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.600.956.592.941	1.416.441.373.141	88,47
		PROGRAM : PENDAFTARAN PENDUDUK	248.308.000	228.480.750	92,02
		PROGRAM : PENCATATAN SIPIL	20.395.000	17.010.000	83,40
		PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	87.222.500	41.045.500	47,06
		PROGRAM : PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	4.248.000	2.486.300	58,53
		PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.177.895.000	3.403.980.695	81,48
		PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.514.115.500	5.710.398.434	87,66
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	472.861.000	259.412.500	54,86
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	611.089.000	507.866.200	83,11
		PROGRAM : PENGELOLAAN ARSIP	452.398.800	289.633.384	64,02
		PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	53.483.000	53.261.000	99,58
		PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.232.083.089	4.714.739.952	75,65
		PROGRAM : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.018.529.456	2.918.135.866	72,62
		PROGRAM : PENGELOLAAN PERBATASAN	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.454.608.216	23.180.885.110	94,79
		PROGRAM : PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.630.511.500	1.214.572.420	74,49
		PROGRAM : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	837.915.250	458.236.010	54,69
		PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	911.015.000	587.267.700	64,46
		PROGRAM : RISET DAN INOVASI DAERAH	0	0	#DIV/0!
		PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	363.594.377.859	356.868.610.041	98,15
		PROGRAM : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.396.838.500	1.226.521.666	87,81
		PROGRAM : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.101.542.700	4.161.455.337	68,20
		PROGRAM : KEPEGAWAIAN DAERAH	3.635.523.000	2.823.663.575	77,67
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.543.716.500	2.195.170.000	86,30
		PROGRAM : PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	692.858.000	178.985.000	25,83
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	638.130.993	471.903.109	73,95
		PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.092.005.975	1.018.507.000	93,27
		PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	420.887.932	324.720.400	77,15
		JUMLAH 1	2.031.799.152.711	1.829.298.321.090	90,03
		JUMLAH TOTAL	2.031.799.152.711	1.829.298.321.090	90,03
JUMLAH MISI 1 + MISI 2 + MISI 3 +MISI 4			2.786.085.169.101	2.427.693.258.869	87,14

DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
1	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk kategori Parade Drum Band dengan Regu Terbanyak dalam acara "Parade Drumband Gebyar Merah Putih" diikuti sebanyak 109 grup drum band, melibatkan lebih dari 6.000 penabuh	Museum Rekor Indonesia (MURI)	
2	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk kategori Kerja Bakti Bersih Jalan oleh Peserta Terbanyak dalam Kegiatan Gerakan NGOSREK Bareng Purwakarta Istimewa Dalam rangka peringatan Hari Jadi Purwakarta ke-194 dan Hari Jadi Kabupaten ke -57 diikuti lebih dari 400 ribu peserta	Museum Rekor Indonesia (MURI)	
3	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai "Best Gerabah Teracotta" (Pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) ke-25 Tahun 2025)	Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI)/ Kementerian Perindustrian	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
4	Tanda Penghargaan Swasti Saba Wiwerda atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	
5	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pratama	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	 Terbaik II

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
6	Sertifikat Bebas Frambusia	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	
7	Daerah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) Tahun 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
8	Kabupaten/Kota dengan Capaian Pengobatan TBC pada Fasyankes Swasta Terbaik di Jawa Barat Tahun 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
9	Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥3 per 100.000 penduduk <15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubela) Rate ≥2 per 100.000 penduduk pada Tahun 2024	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
10	Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥3 per 100.000 penduduk <15 tahun pada tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	
11	Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target Discarded (bukan campak-bukan rubela) Rate ≥2 per 100.000 penduduk pada tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	
12	Penghargaan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disipusda) Kabupaten Purwakarta dinobatkan sebagai Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dengan Penyedia Informasi Kearsipan Melalui SIKN/JIKN V.2 Terbaik II Tahun 2024. (Forum Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 yang digelar Pemprov Jawa Barat)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
13	Penghargaan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disipusda) Kabupaten Purwakarta dinobatkan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Perbaikan Khusus Arsip Korporasi dan Keluarga (PhUSAKA). (Forum Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 yang digelar Pemprov Jawa Barat)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
14	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi “Informatif” Dalam Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
15	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai 10 Besar Instansi Terbaik Kategori Media On Ground Activation (Pariwara Antikorupsi & Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2025)		
16	Penghargaan Untuk Kabupaten Purwakarta kepada dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS., MH. Kes., CGRE Sebagai Inovator Terbaik II Kategori peserta Kepemimpinan Nasional Tk.ll (LAN Awards ASN LIFT EXPO 2025)	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
17	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas Kualifikasi “Unggul” pada Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia)	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	
18	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas Keberhasilannya dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	

NO	Nama Penghargaan	Lembaga/Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
19	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas Best Investment Project for Private Project in Supporting Green & Circular Economy (West Java Investment Challenge 2025)		